

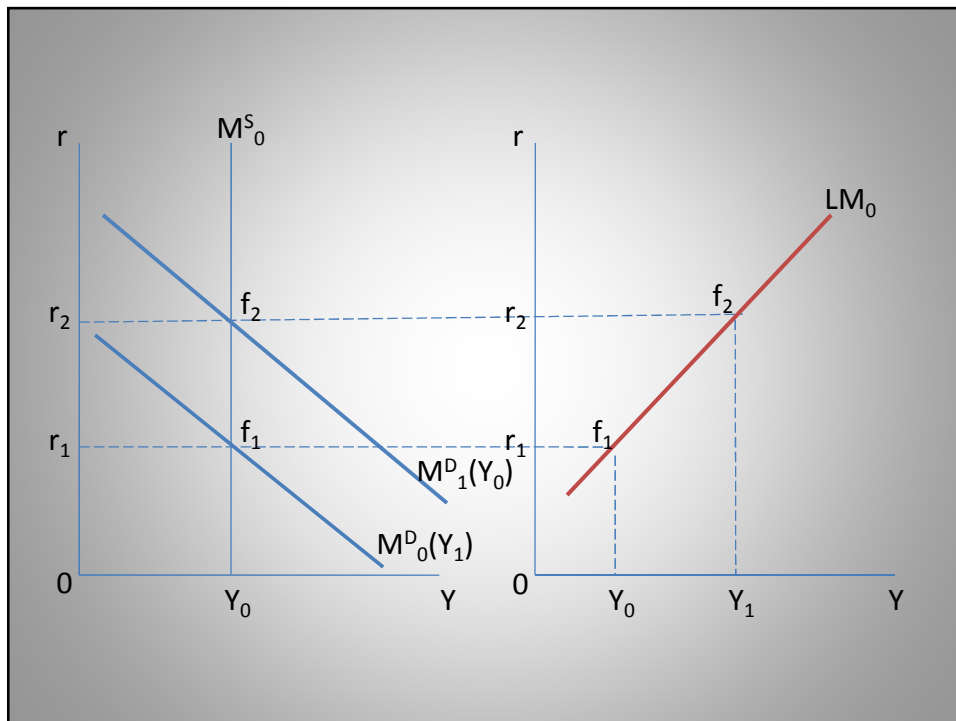
# KEBIJAKAN MONETER DAN KEBIJAKAN FISKAL

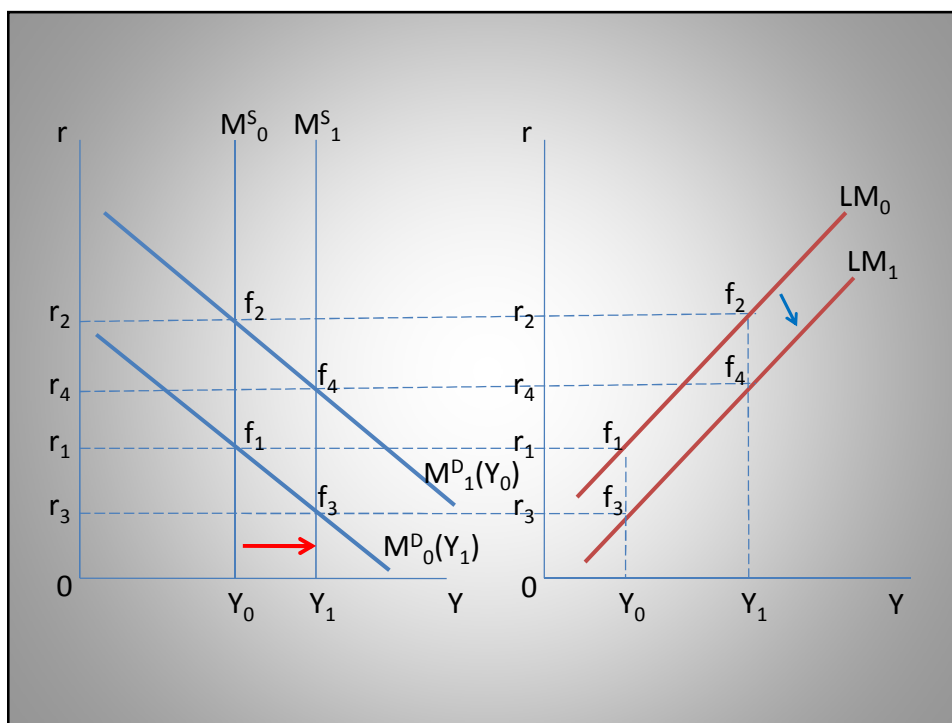
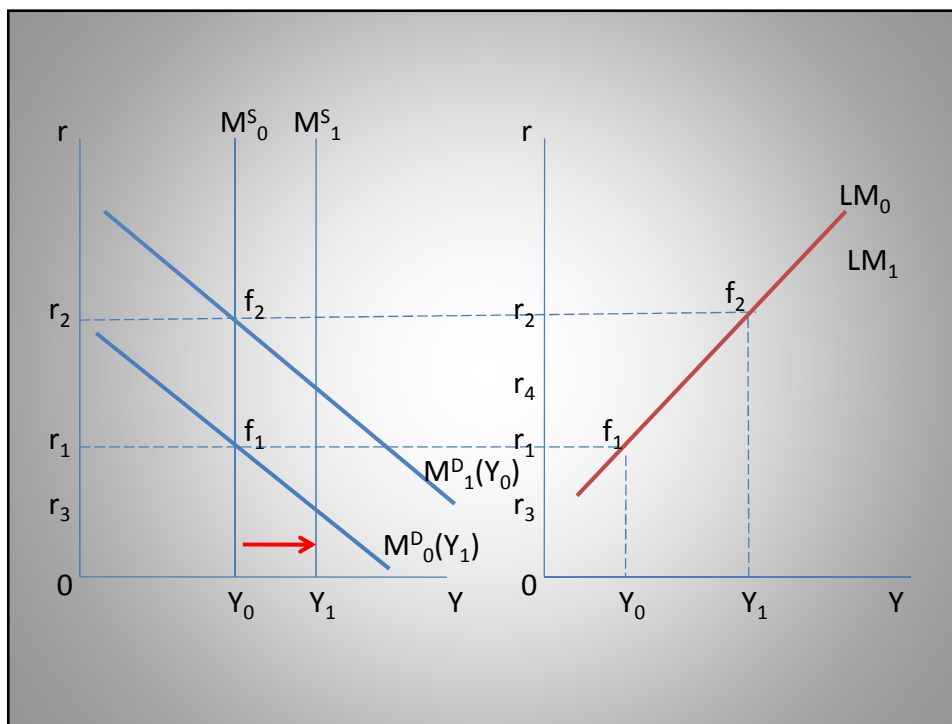
**DR. MOHAMMAD ABDUL MUKHYI, SE., MM**

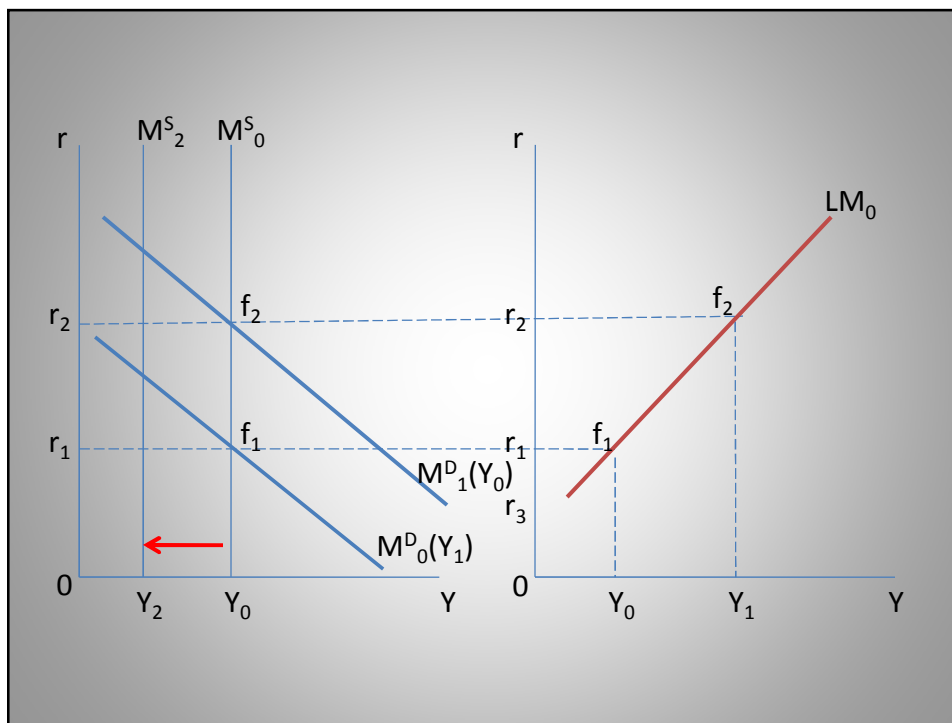
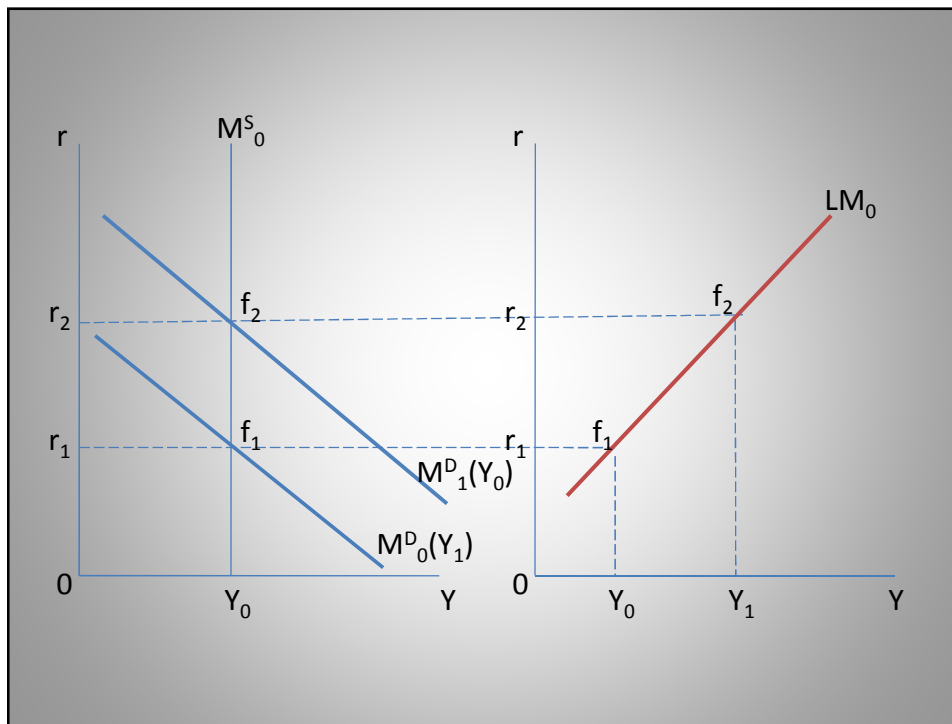
## DEFINISI

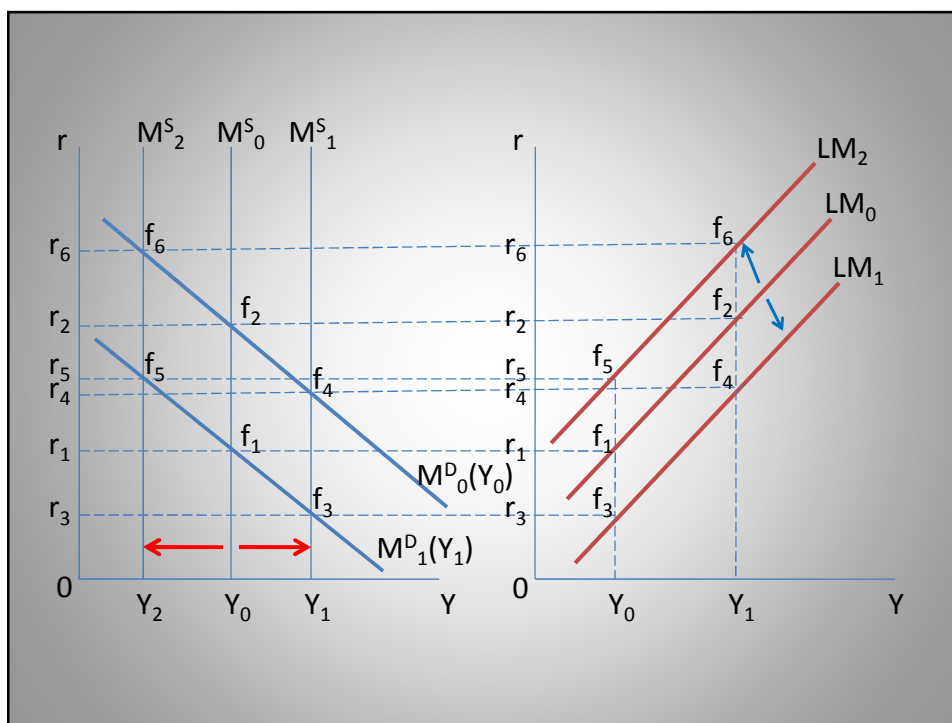
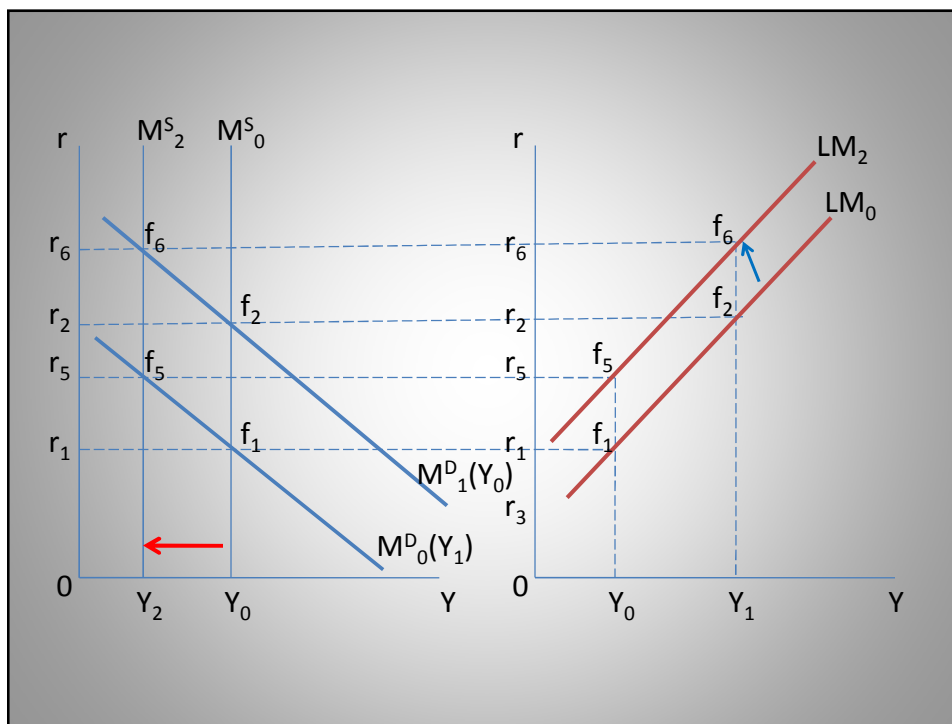
- Kebijakan dengan mengatur jumlah uang beredar.
- Instrumen kebijakan moneter :
  - Open Market Operation  
Melalui surat berharga milik pemerintah (SBI, SBPU) →  
*repurchase agreement*
  - Discount Rate  
Tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum.
  - Reserve Requirement Ratio  
Mengukur efek multiplier dari cadangan wajib yang diharuskan
  - Moral Persuasion

PENGARUH KEBIJAKAN MONETER  
TERHADAP KESEIMBANGAN  
PASAR UANG - MODAL

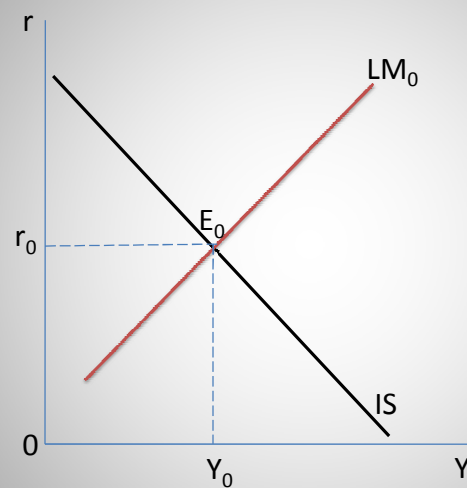


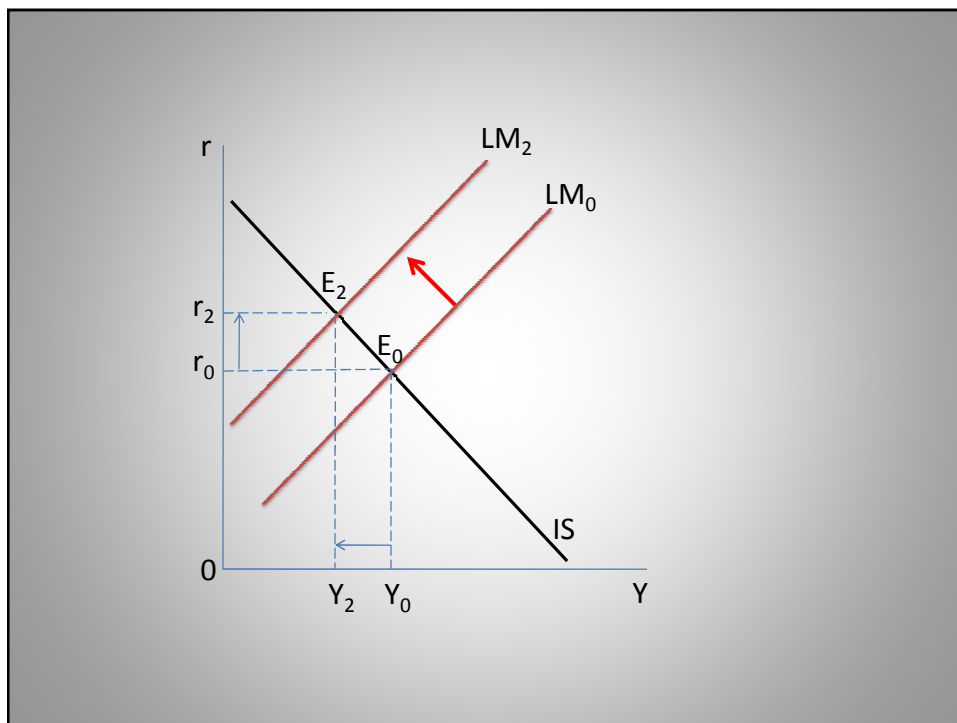
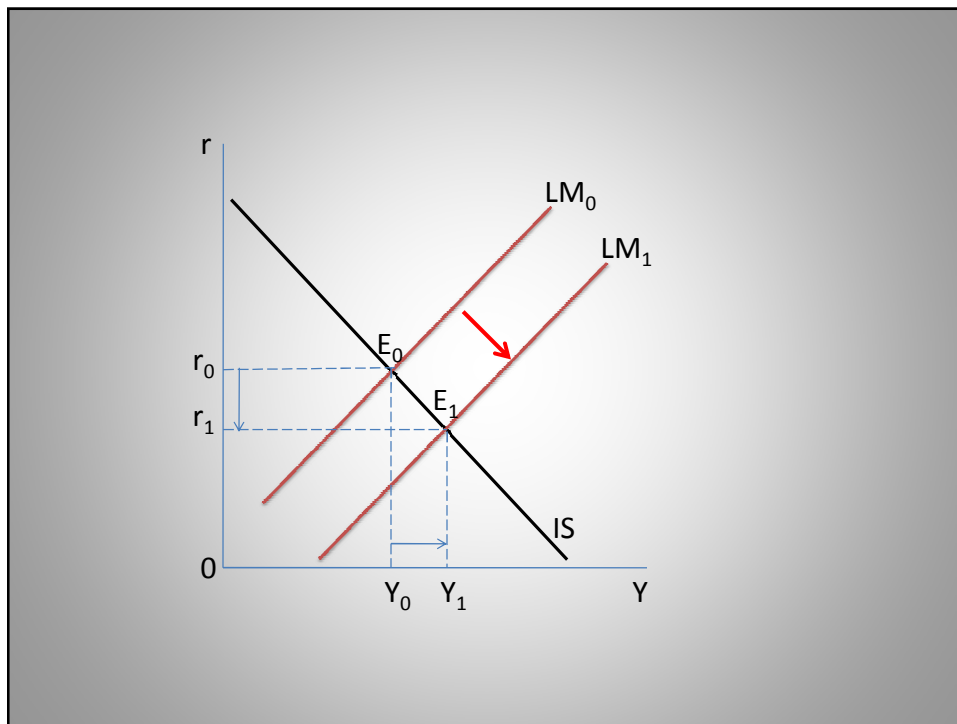


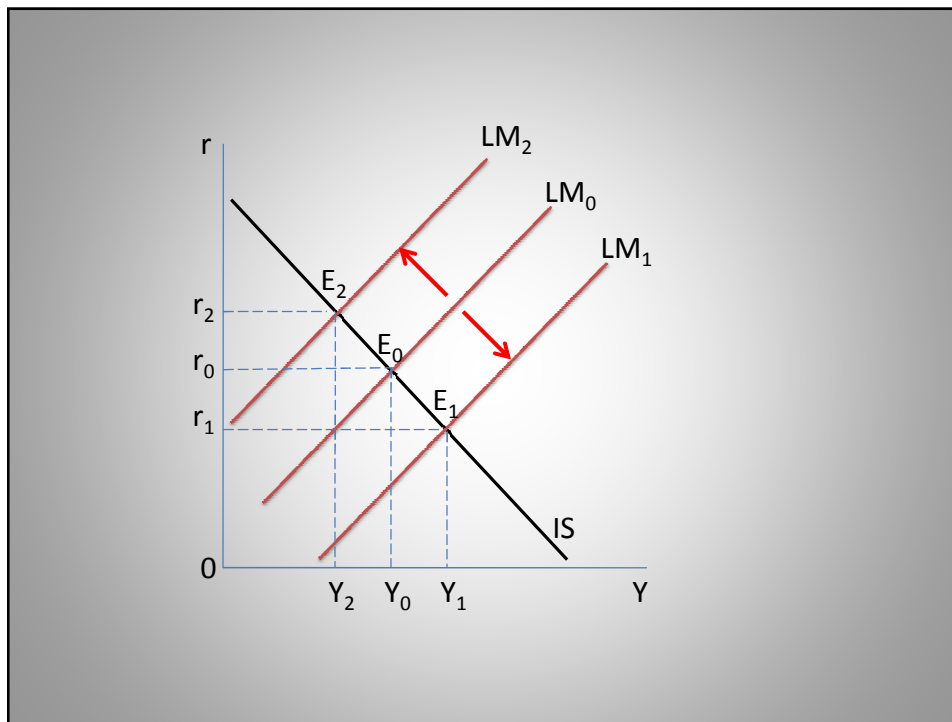




## PENGARUH KEBIJAKAN MONETER TERHADAP KESEIMBANAN EKONOMI

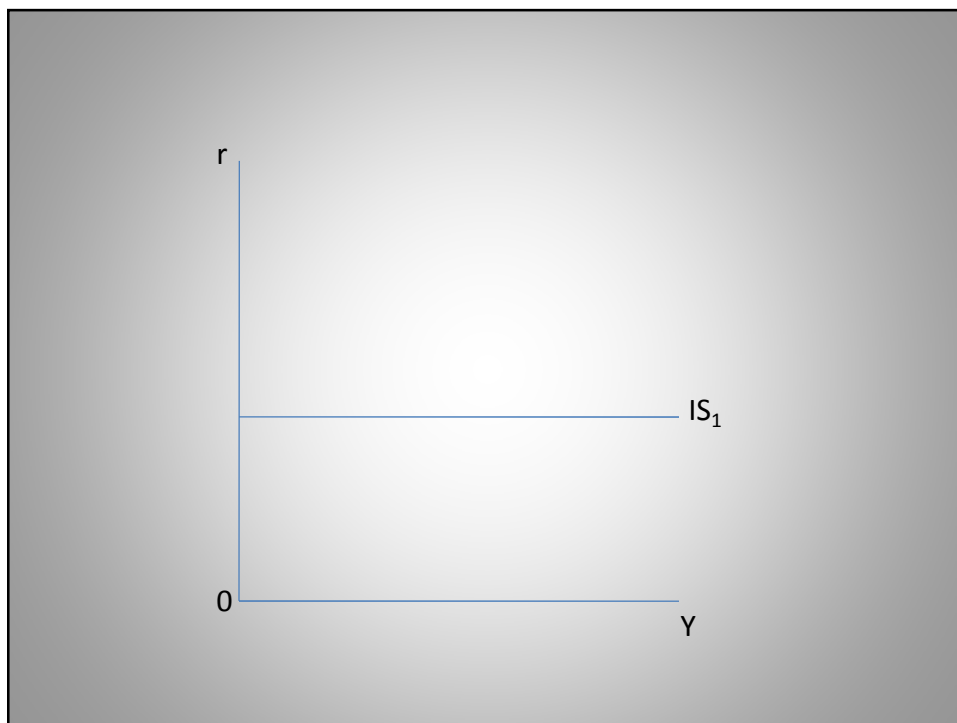
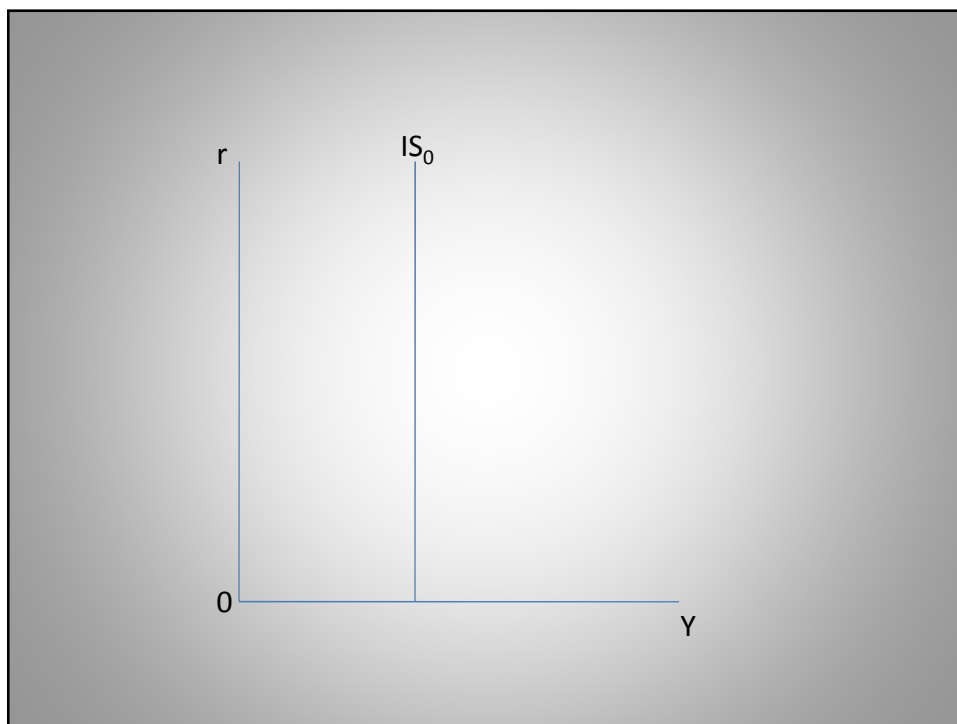


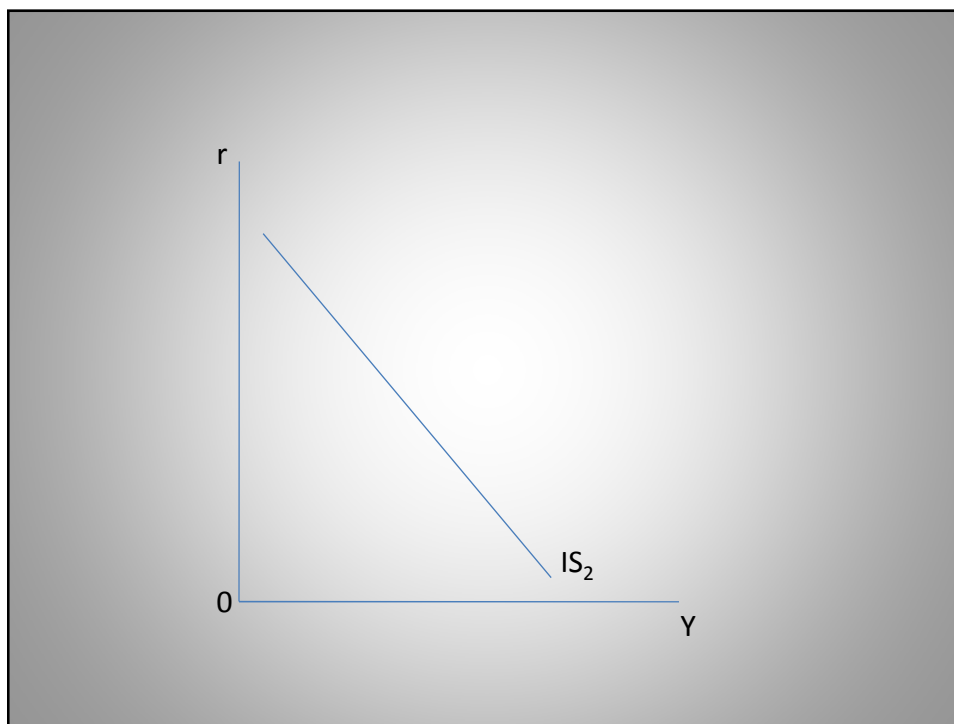




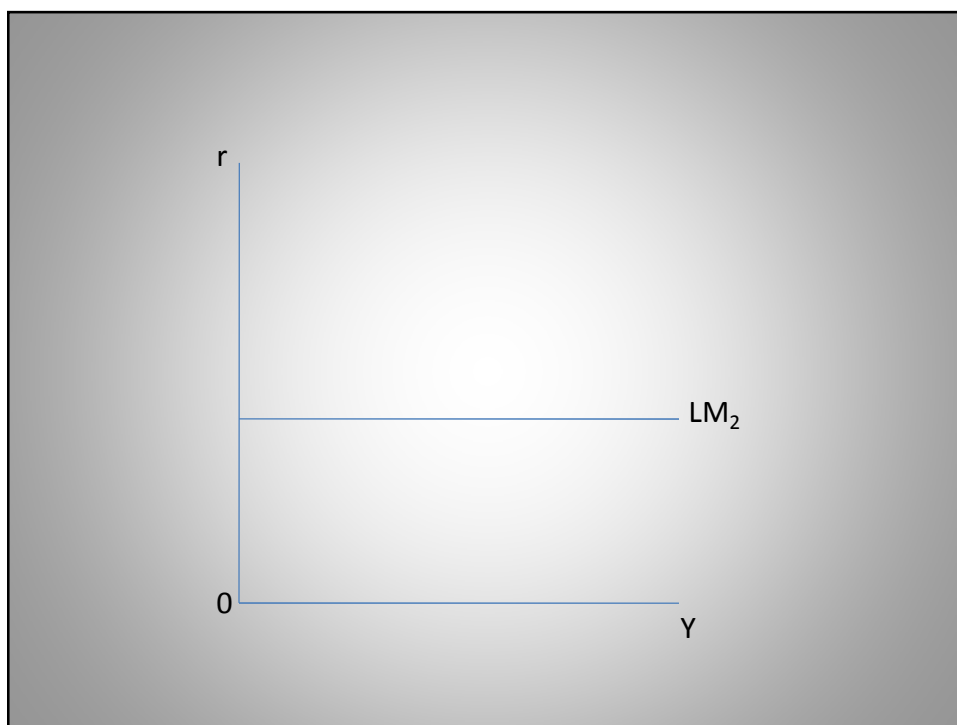
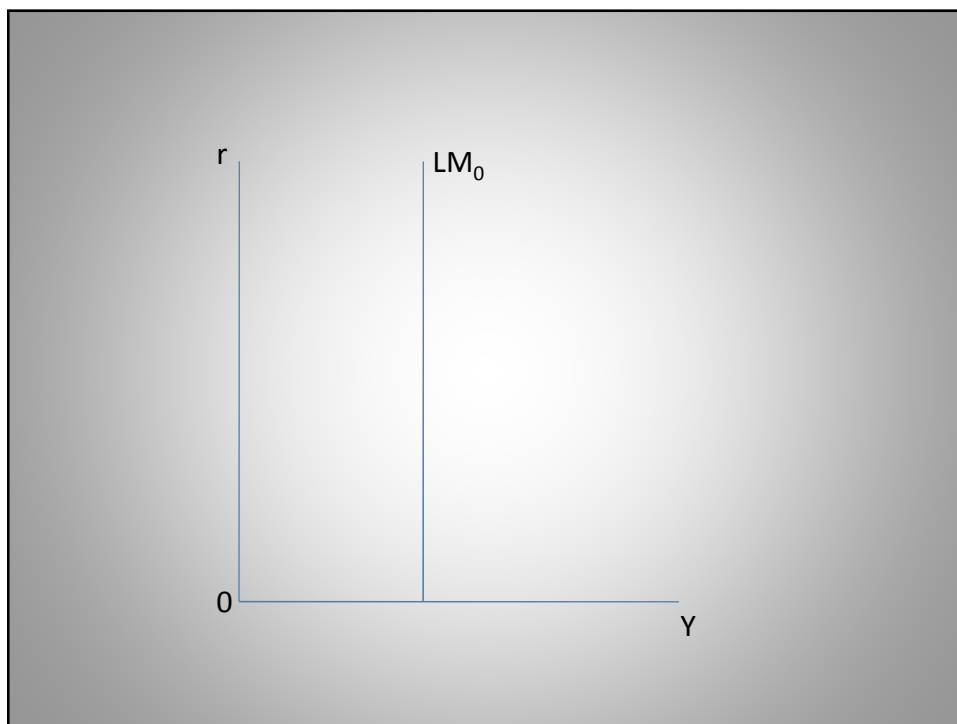
Efektivitas Kebijakan Fiskal

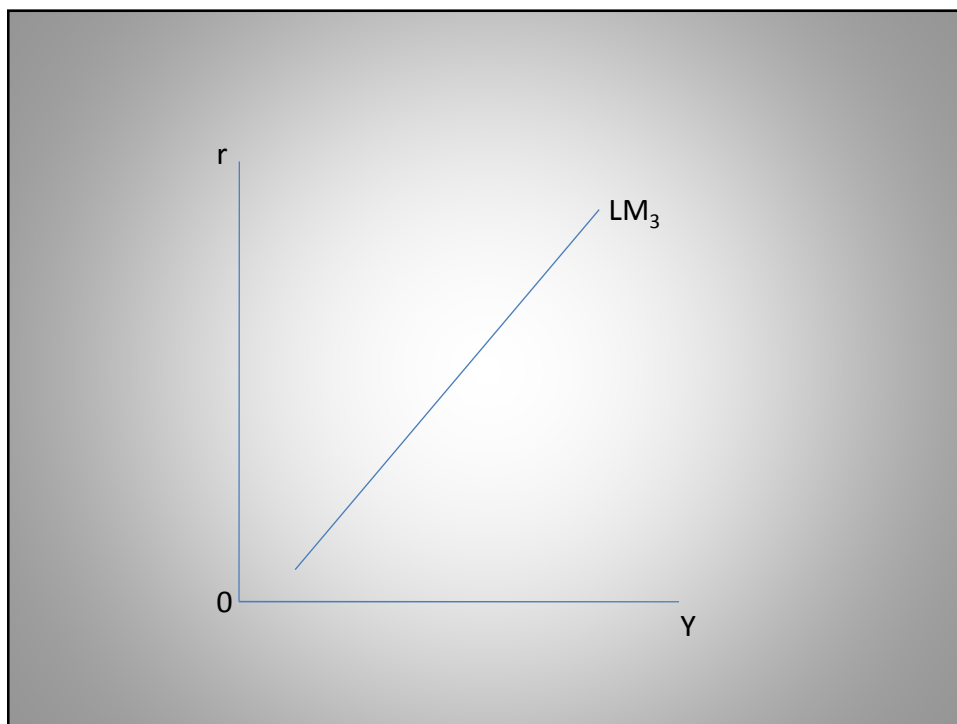




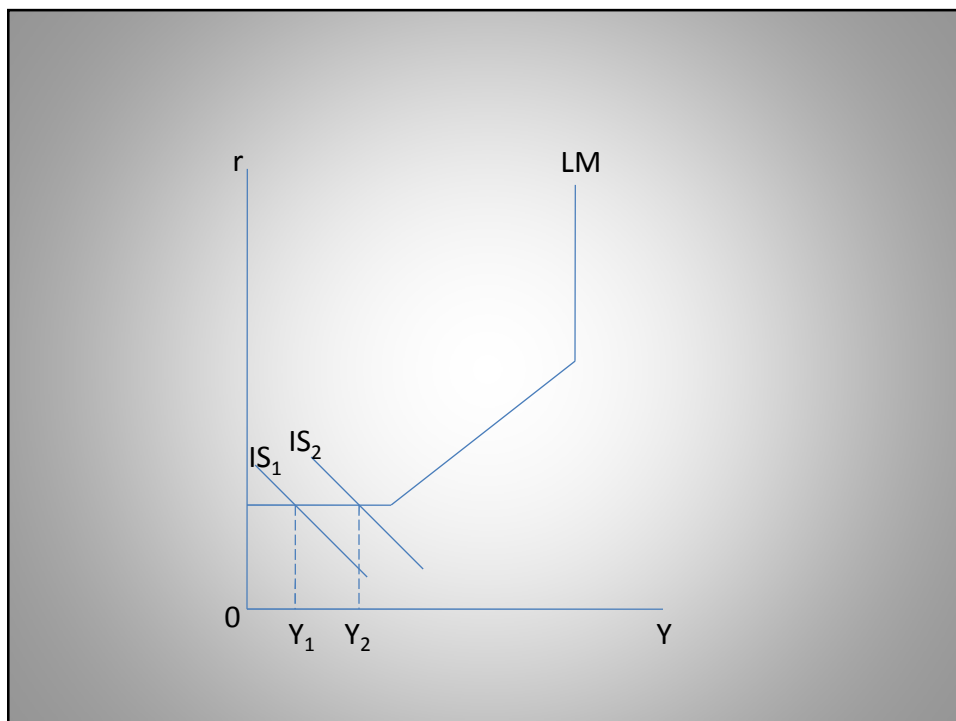
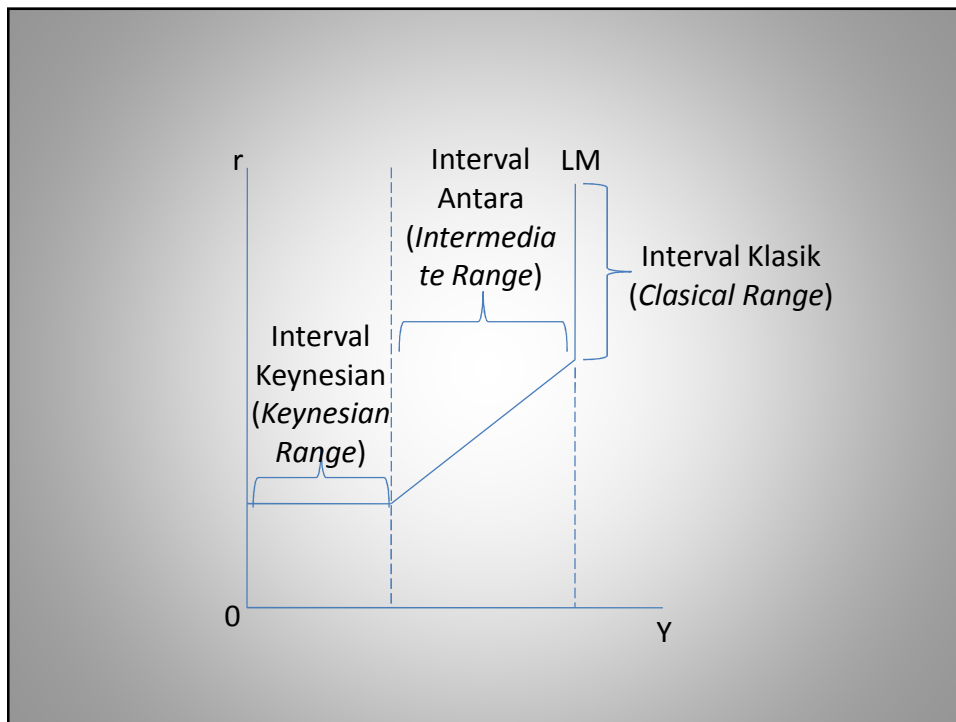


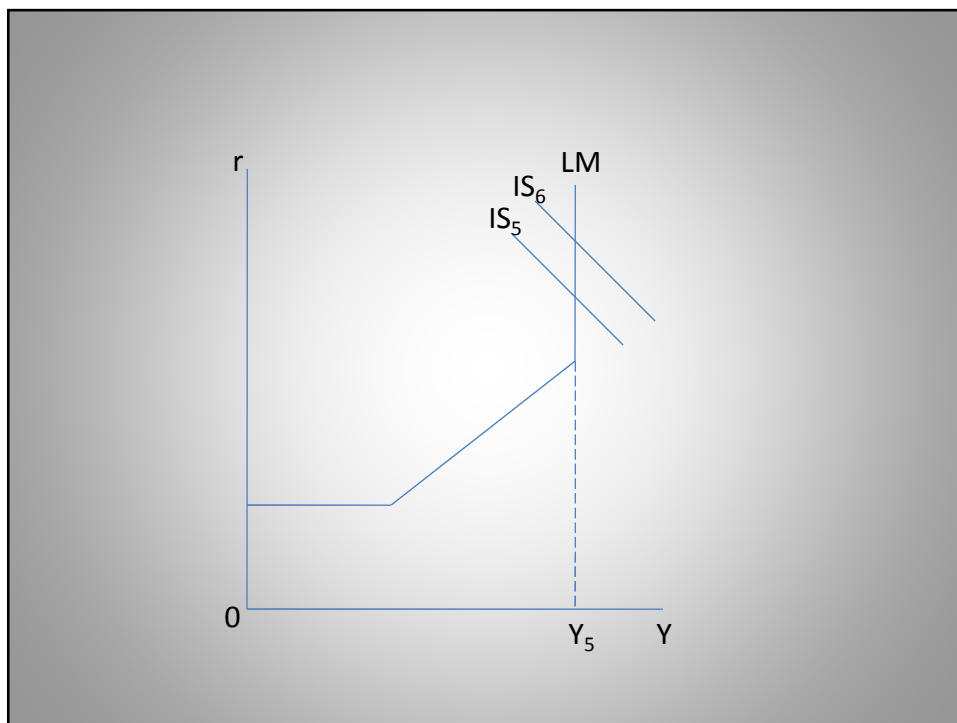
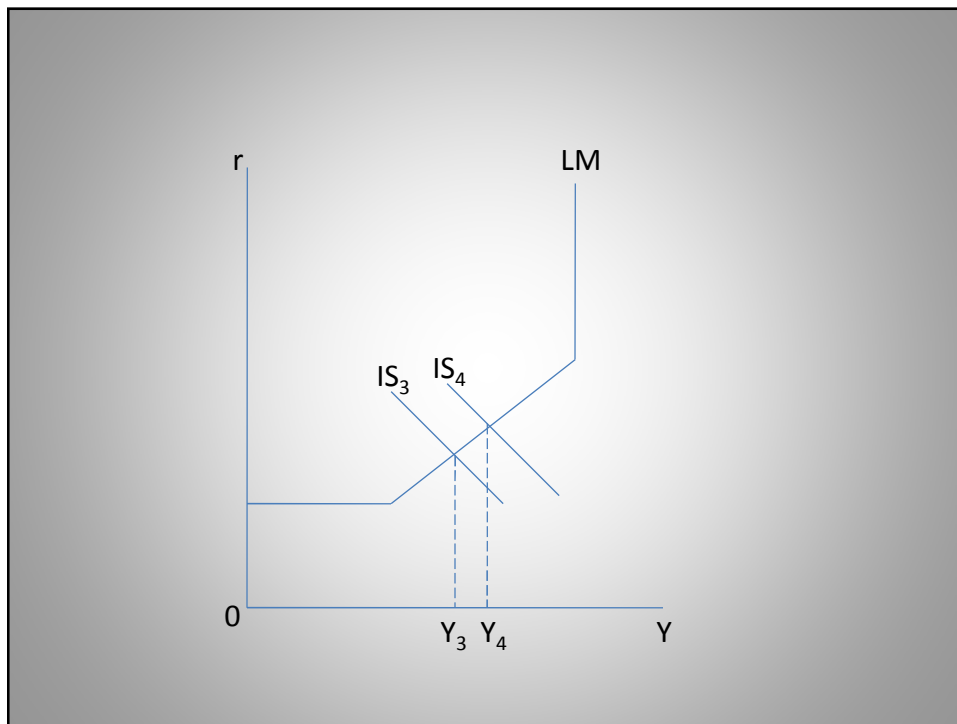
Efektivitas Kebijakan Moneter

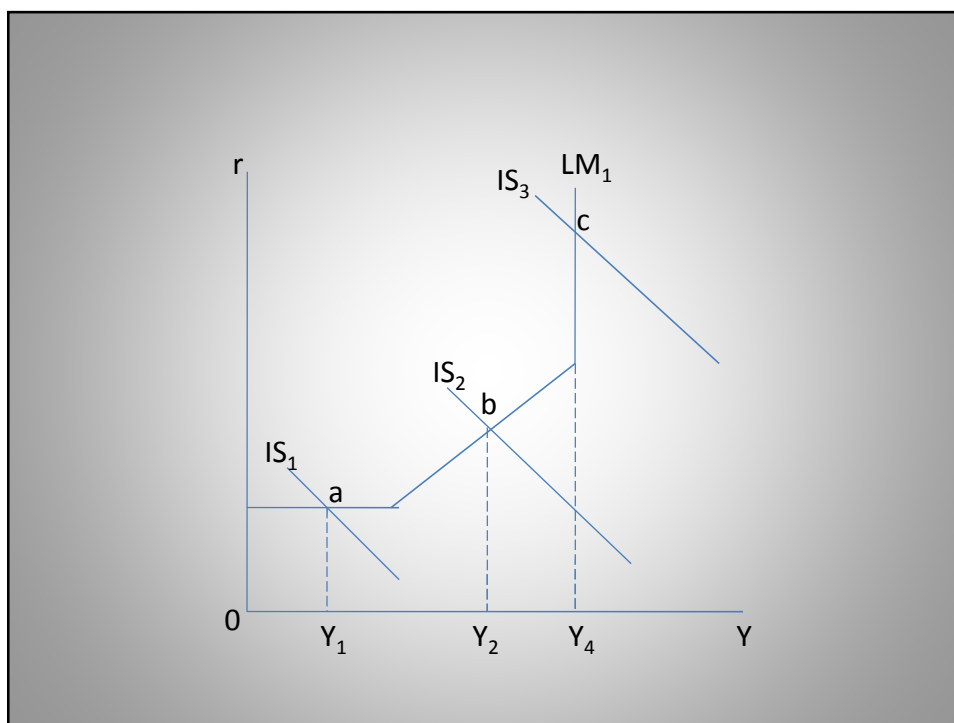
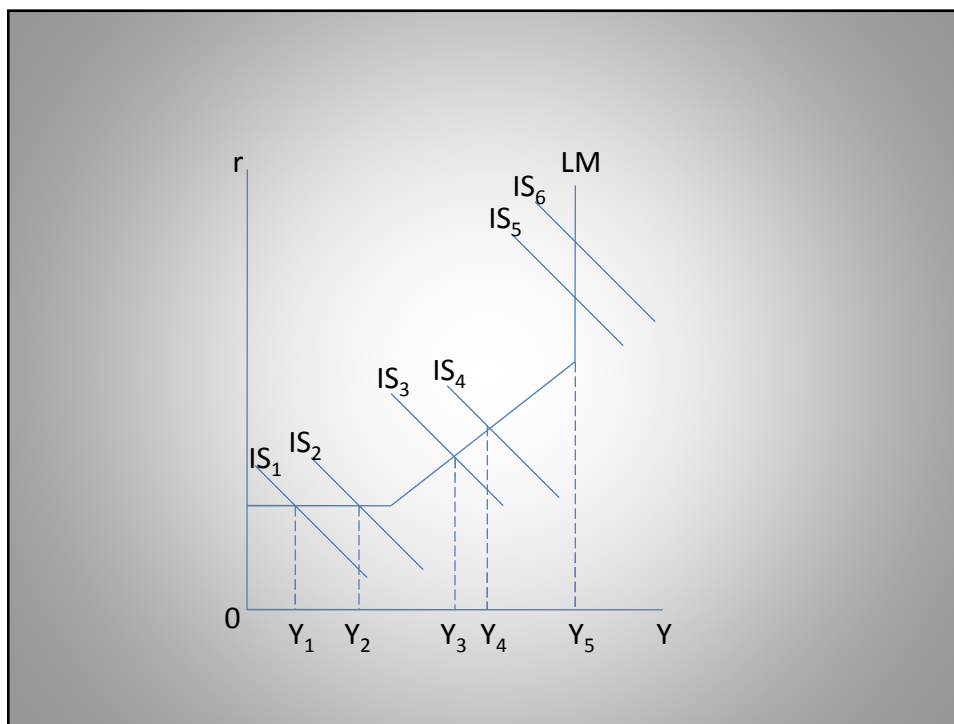


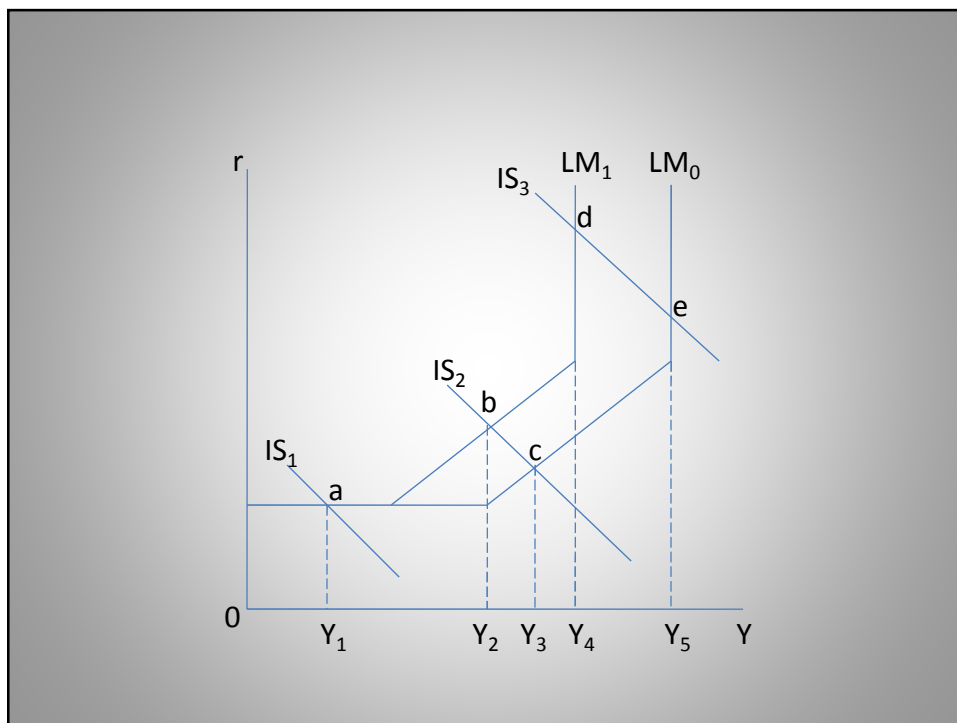
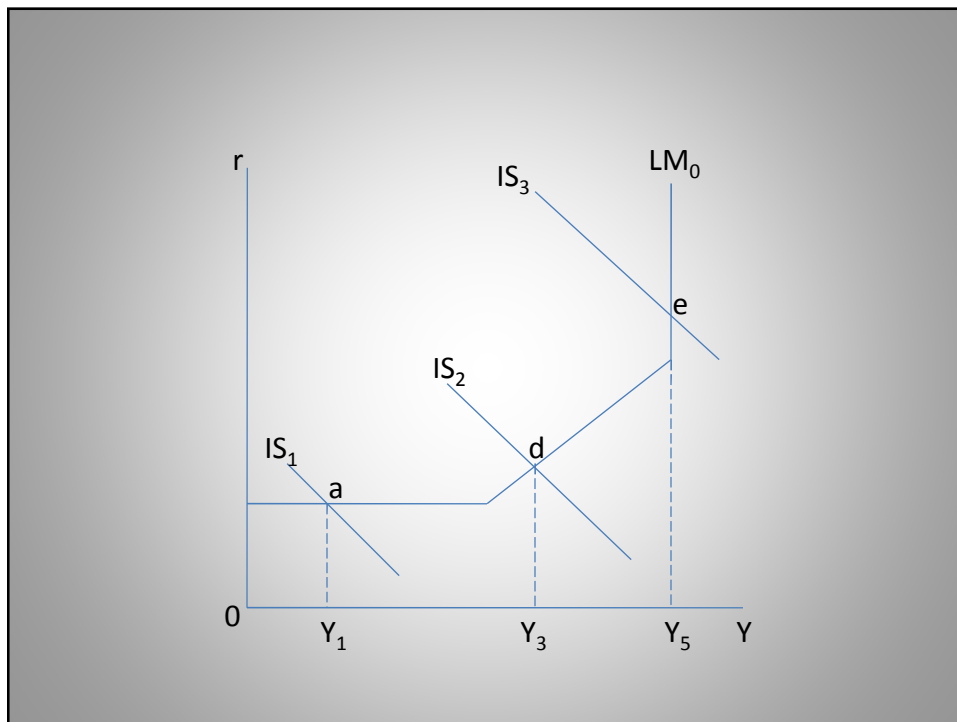


EFEKTIVITAS KEBIJAKAN  
FISKAL DAN MONETER

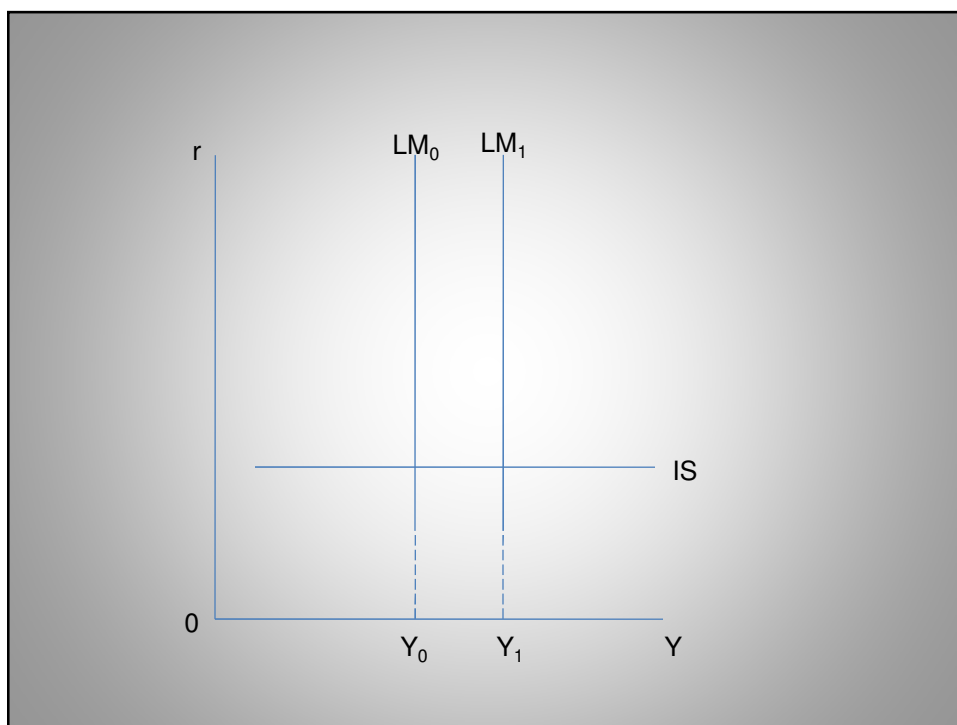
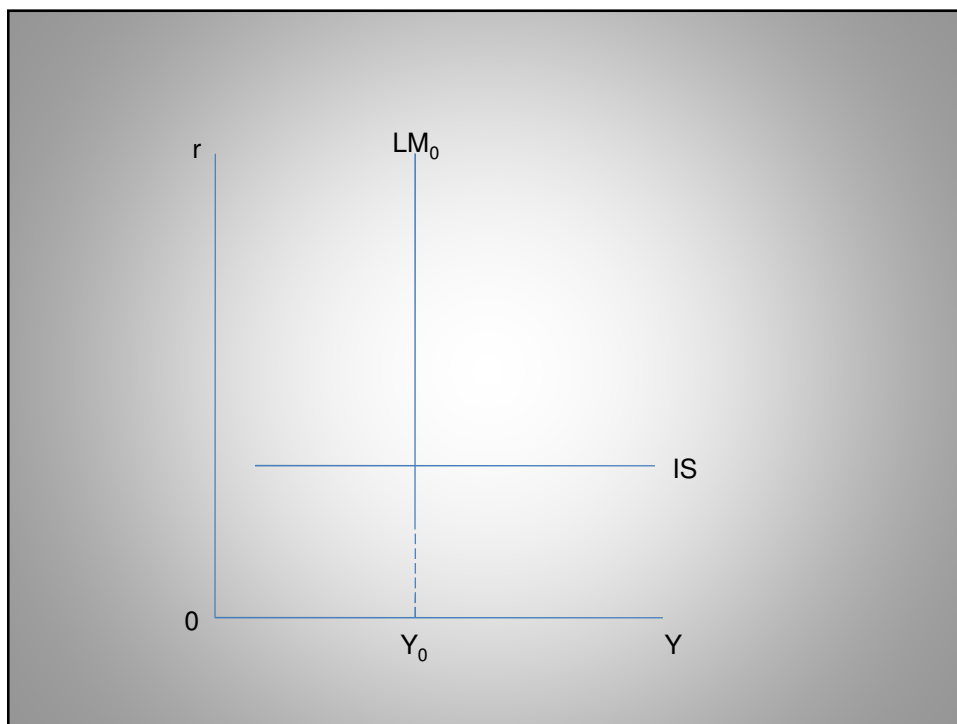


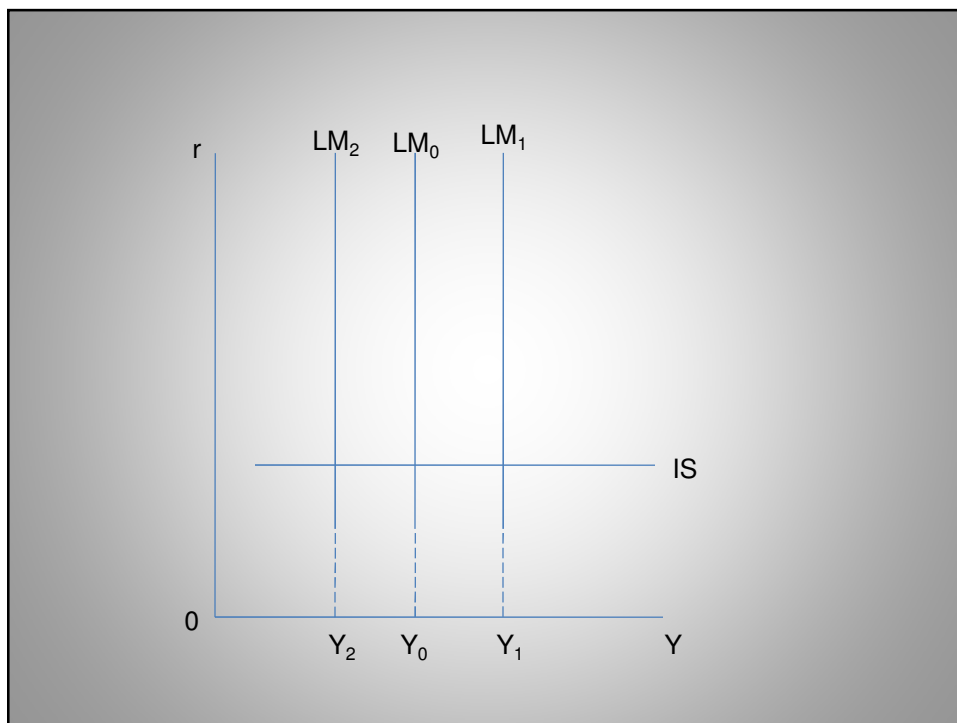
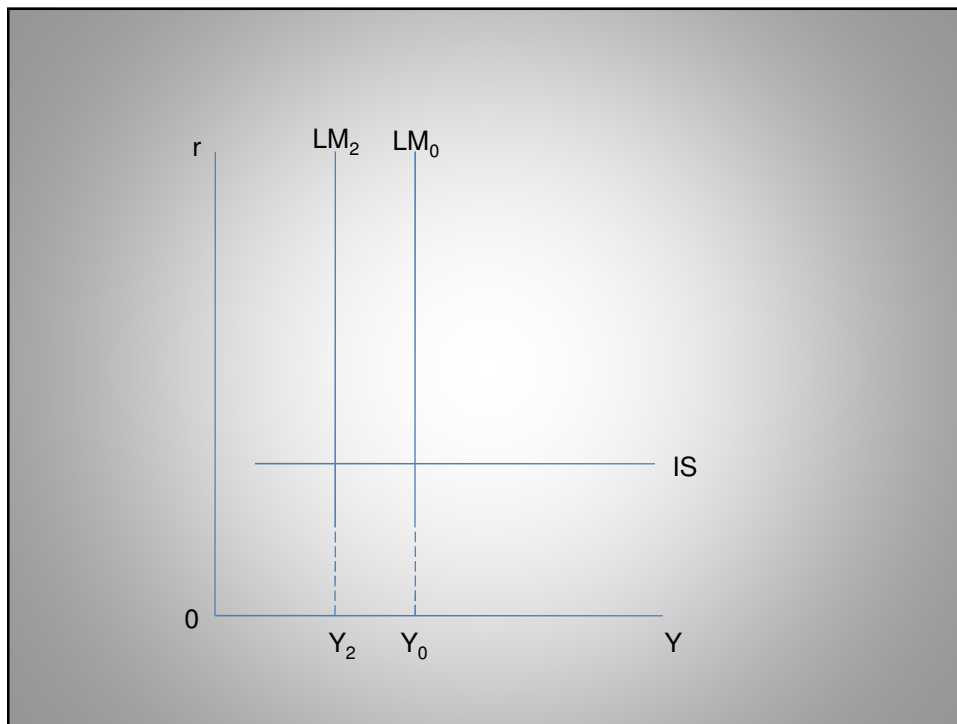


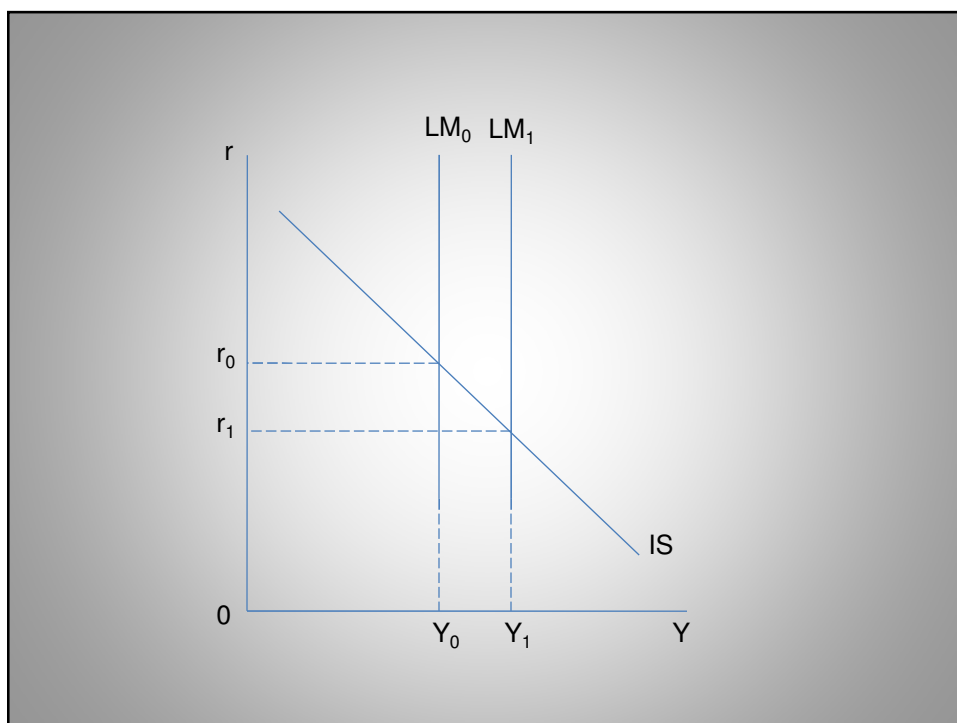
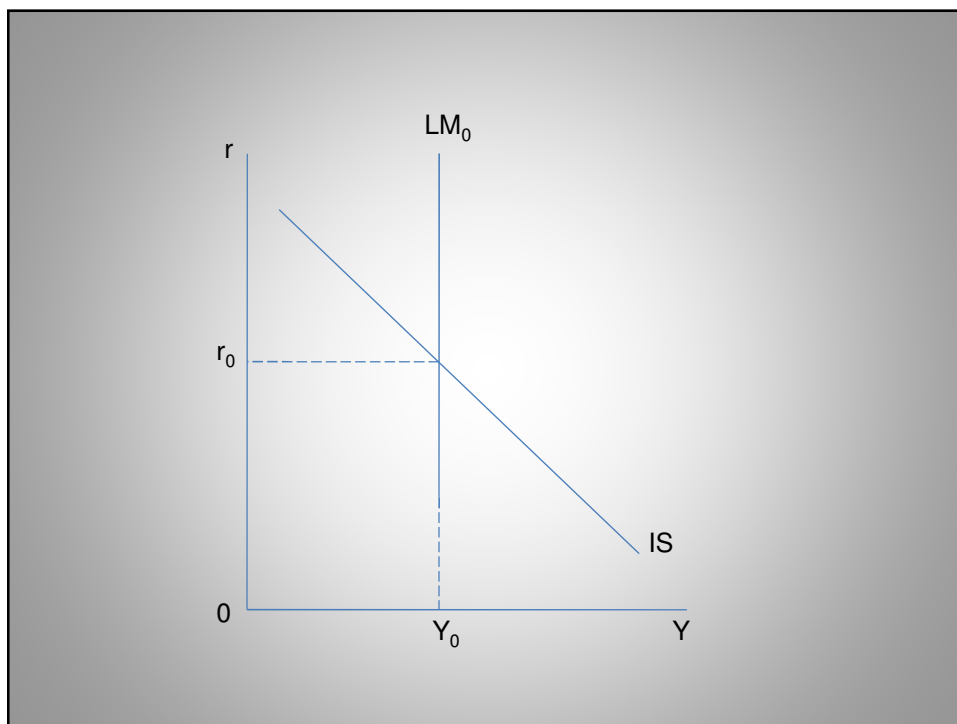


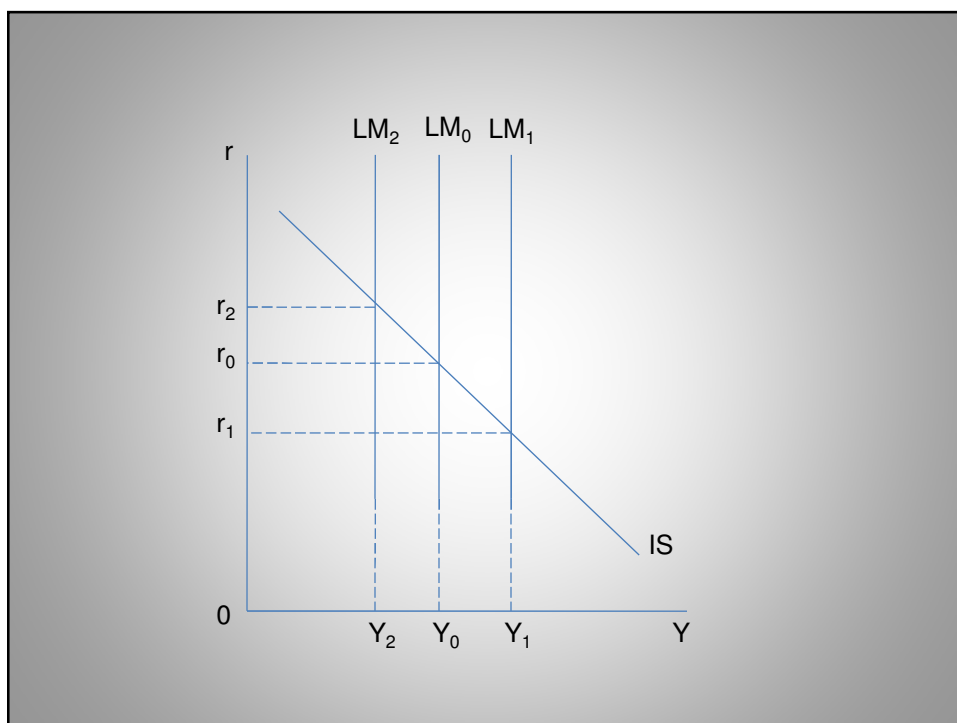
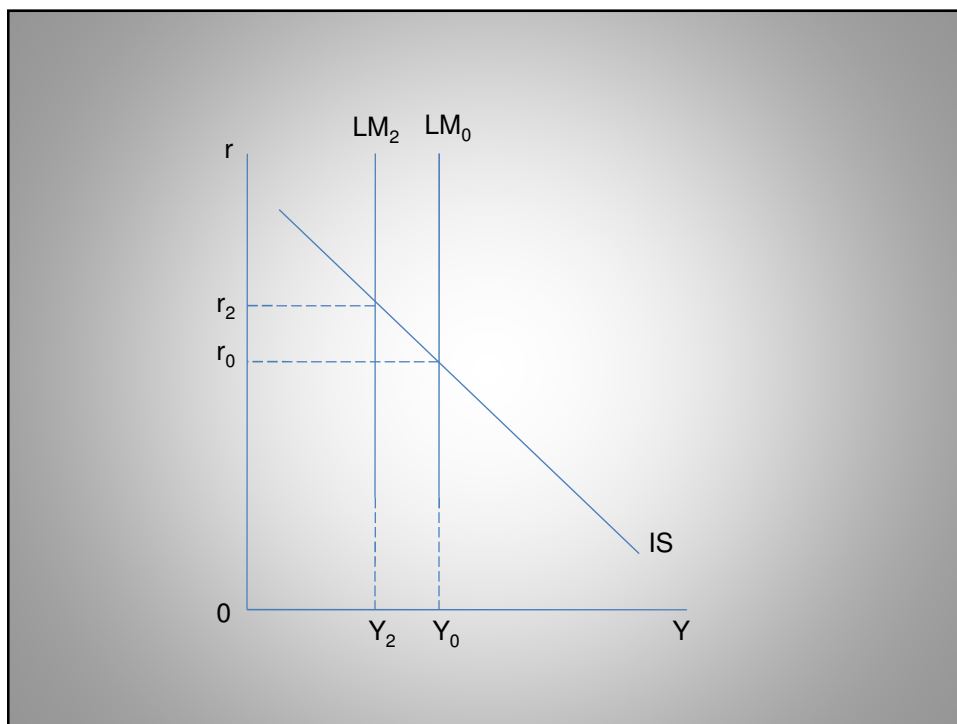


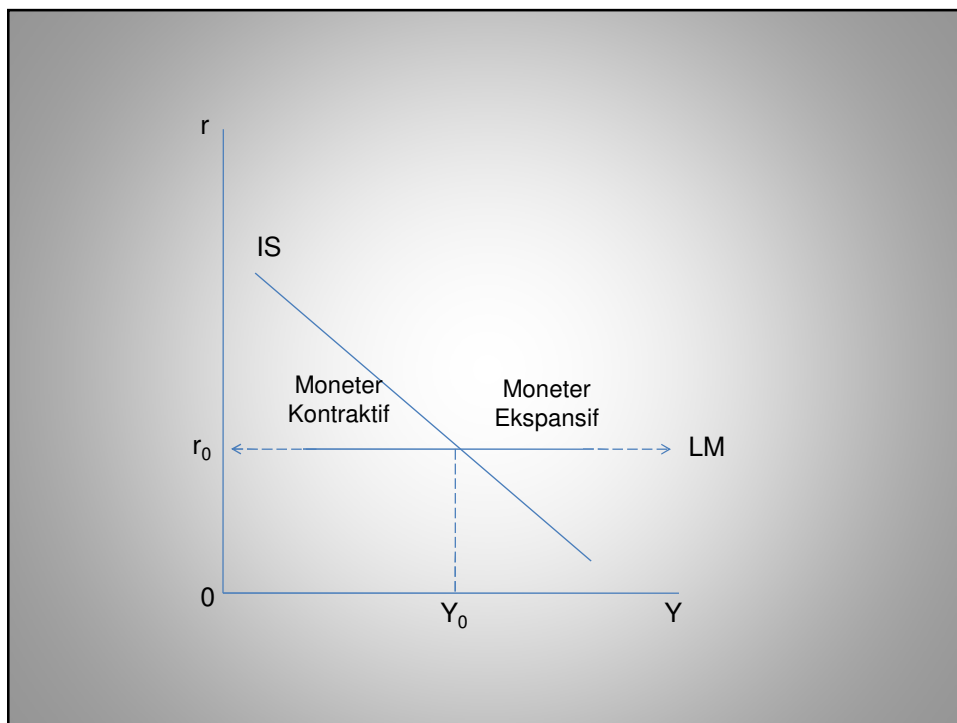
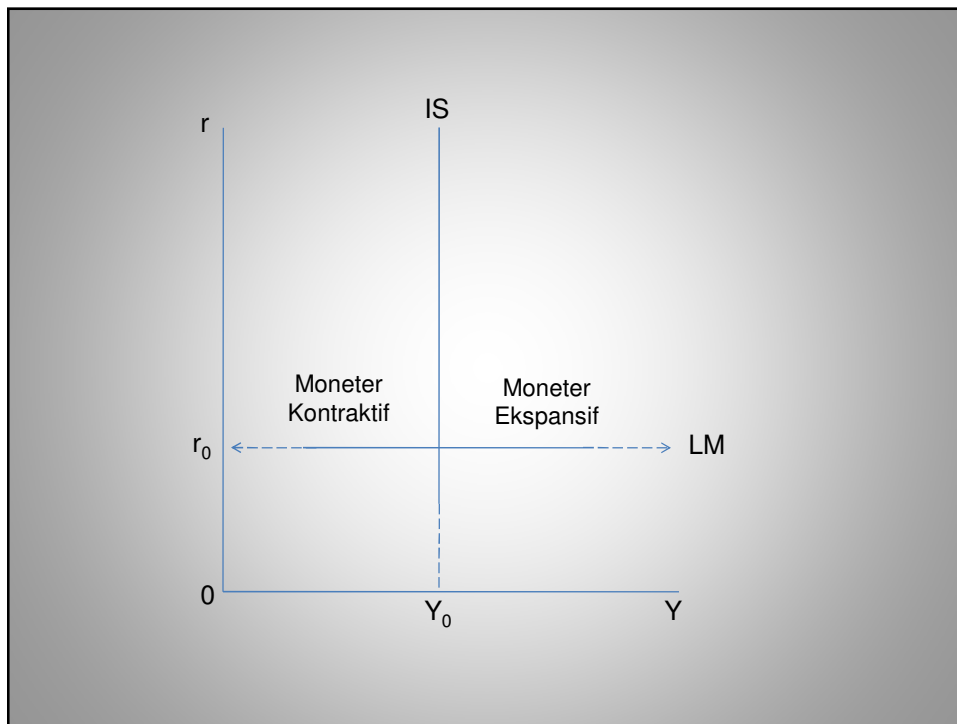












Kebijakan	Jerat Likuiditas	Tengah	Klasik
Fiskal	Paling Efektif	Efektif	Tidak Efektif
Moneter	Tidak Efektif (money does not matter)	Efektif	Paling Efektif

Efektivitas Kebijakan Moneter Terhadap Output dan Tingkat Harga (Bunga)

	KURVA IS DATAR ELASTISITAS SEMPURNA	KURVA IS INELASTIS SEMPURNA	KURVA IS NEGATIF
KURVA LM ELASTIS SEMPURNA (INTERVAL KEYNES)	Tidak terdefiniskan	Moneter Ekspansif atau Kontraktif tidak efektif, $Y^*$ dan tingkat bunga tetap.	Moneter Ekspansif atau Kontraktif tidak efektif, $Y^*$ dan tingkat bunga tetap.
KURVA LM INELASTIS SEMPURNA (INTERVAL KLASIK)	1. Moneter Ekspansif, $Y^*$ naik, tingkat bunga tetap. 2. Moneter Kontraktif, $Y^*$ turun, tingkat bunga tetap.	Tidak terdefiniskan	1. Moneter Ekspansif, $Y^*$ turun, tingkat bunga turun. 2. Moneter Kontraktif, $Y^*$ turun, tingkat bunga naik.
KURVA LM POSITIF (INTERVAL ANTARA)	1. Moneter Ekspansif, $Y^*$ naik, tingkat bunga tetap. 2. Moneter Kontraktif, $Y^*$ turun, tingkat bunga tetap.	1. Moneter Ekspansif, $Y^*$ tetap, tingkat bunga turun. 2. Moneter Kontraktif, $Y^*$ tetap, tingkat bunga naik.	1. Moneter Ekspansif, $Y^*$ naik, tingkat bunga turun. 2. Moneter Kontraktif, $Y^*$ turun, tingkat bunga naik.

## Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

### Klasifikasi Pajak

- a. Pajak Obyektif : pajak yang dikenakan berdasarkan aktivitas ekonomi para wajib pajak.
- b. Pajak Subyektif : pajak yang dipungut dengan melihat kemampuan wajib pajak.
- c. Pajak Langsung : beban pajak yang tidak dapat digeser kepada wajib pajak lain
- d. Pajak tidak Langsung : beban pajak yang dapat digeser kepada wajib pajak lain

### Tarif Pajak

1. Pajak Nominal : pajak yang pengenaannya berdasarkan sejumlah nilai nominal tertentu.
2. Pajak Prosentase : pajak yang pengenaannya berdasarkan persentase tertentu dari dasar pengenaan pajak.
  - a. Pajak Proporsional : tarif persentasenya tetap.
  - b. Pajak Progresif : tarif makin tinggi bila dasar pengenaan pajak makin tinggi.
  - c. Pajak Regresif : tarif makin rendah bila dasar pengenaan pajak makin tinggi.

## Pengaruh Pajak Terhadap Pendapatan dan Konsumsi

### Pajak Nominal:

$$Y_d = Y - T$$

$$C = C_0 + bY_d$$

$$C = C_0 + b(Y - T)$$

$$C = C_0 + bY - bT$$

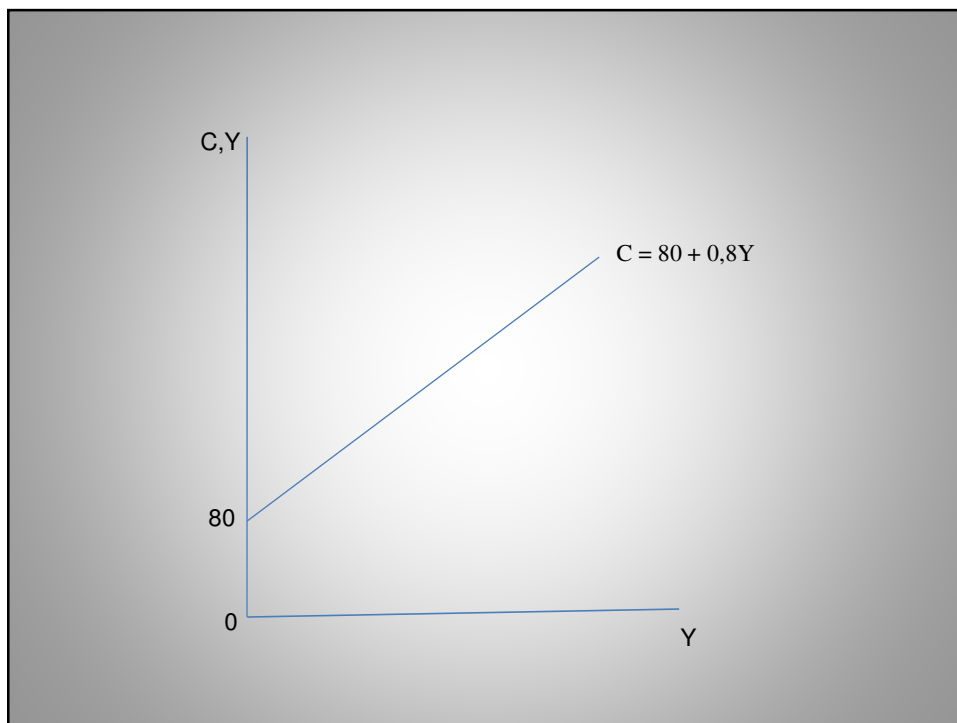
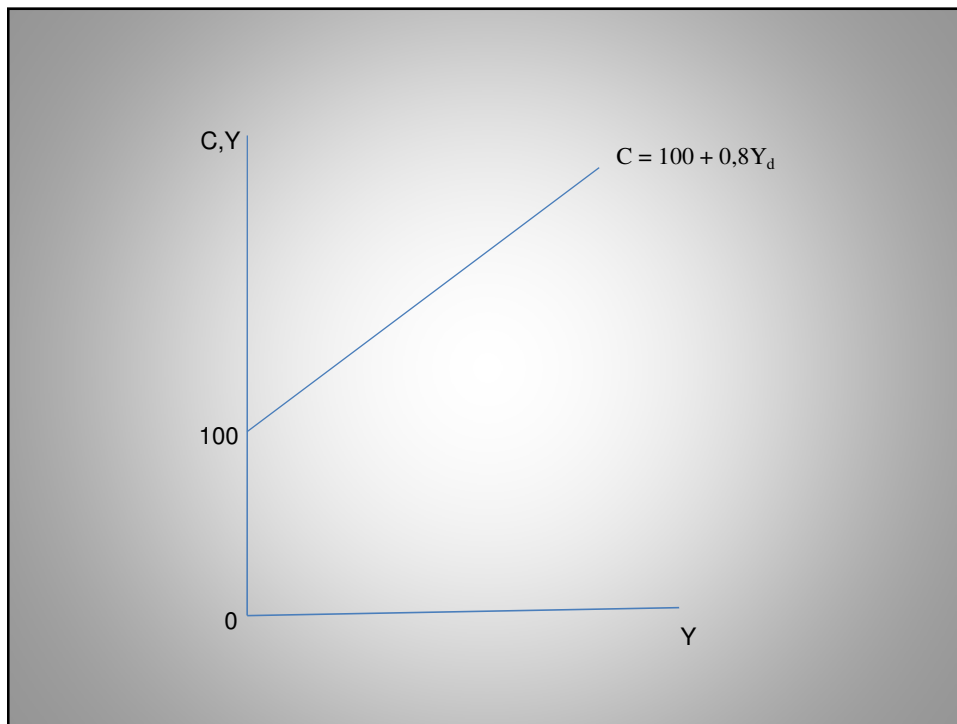
$$C = 100 + 0,8Y_d \text{ dan } T = 25$$

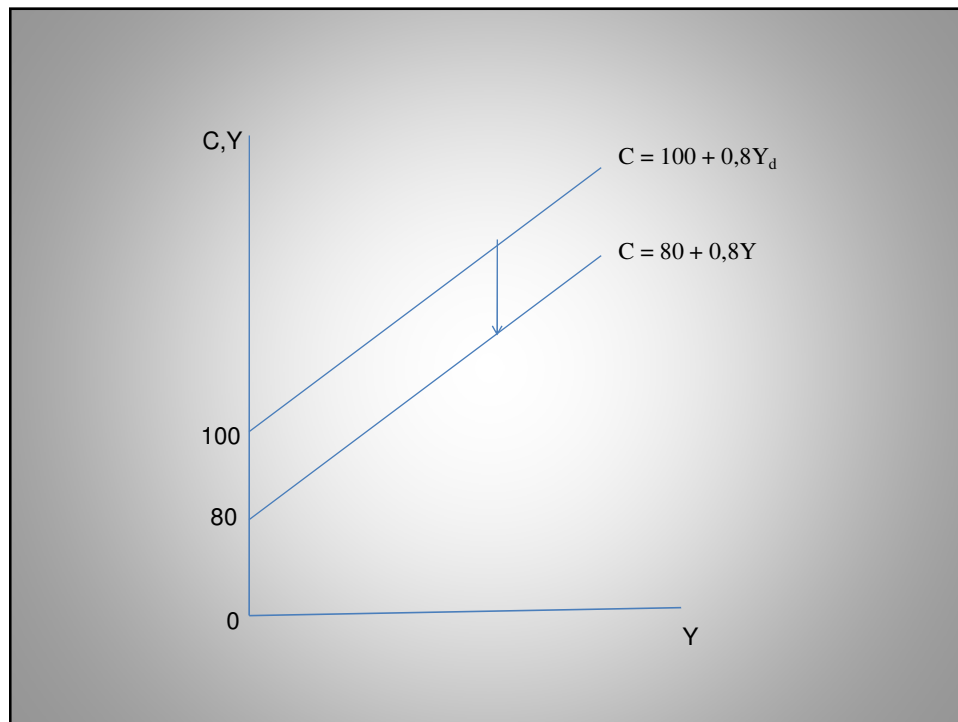
$$C = 100 + 0,8(Y - 25)$$

$$C = 100 + 0,8Y - 20$$

$$C = 80 + 0,8Y$$







## Pengaruh Pajak Terhadap Pendapatan dan Konsumsi

### Pajak Proporsional

$$\text{Pajak} = tY$$

$$Y_d = Y - tY = Y(1-t)$$

$$C = C_0 + bY_d$$

$$C = C_0 + b\{Y(1-t)\}$$

$$C = C_0 + bY - btY$$

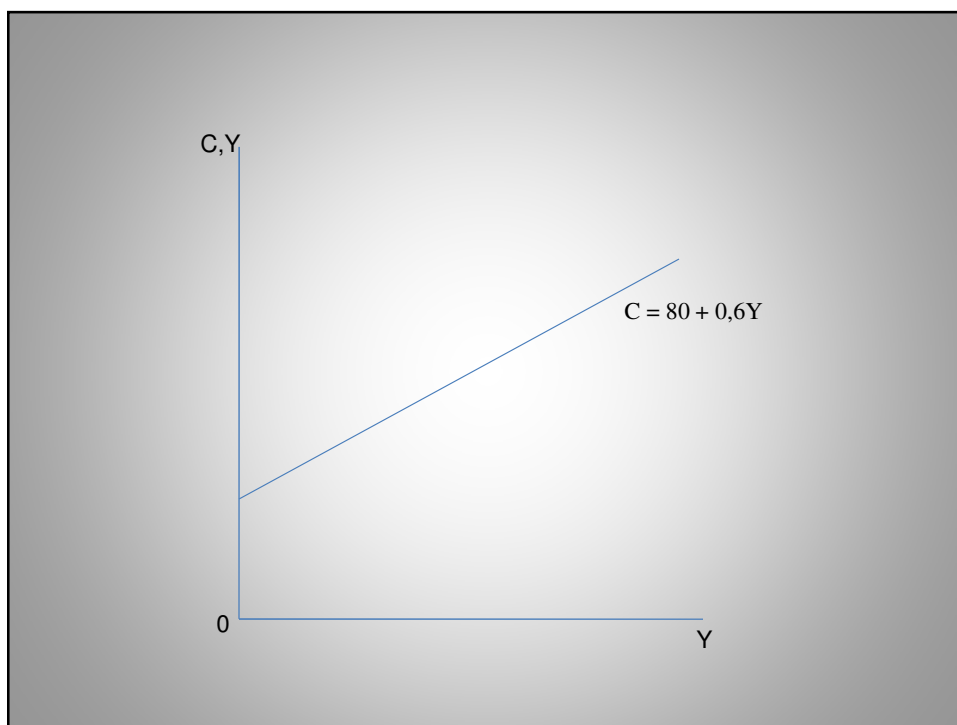
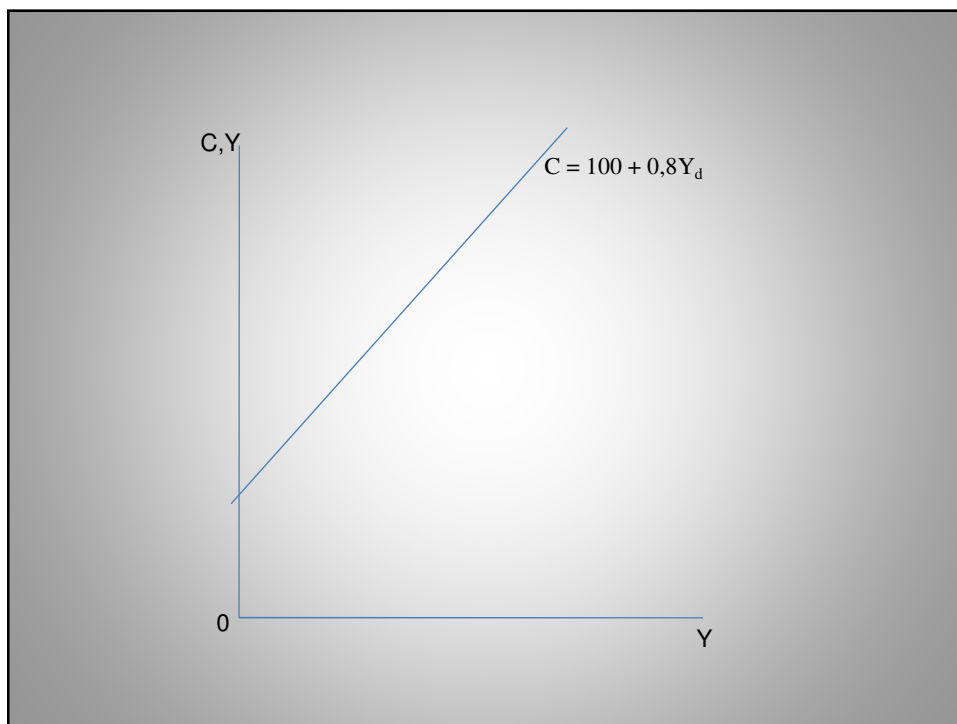
$$C = C_0 + (b - bt)Y$$

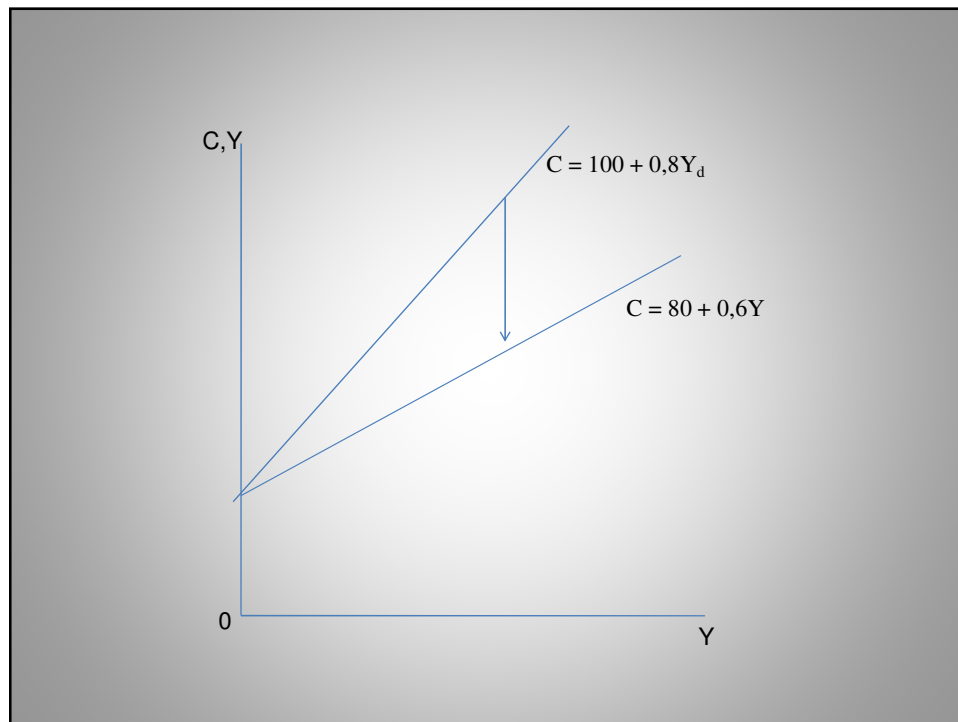
$$C = 100 + 0,8Y_d \text{ dan } T = 25\%$$

$$C = 100 + 0,8(1 - 0,25)Y$$

$$C = 100 + 0,8(0,75)Y$$

$$C = 80 + 0,6Y$$





## Pengaruh Pajak Terhadap Keseimbangan Ekonomi

$$C = 100 + 0,80Y_d$$

$$I = 150$$

$$G = 250$$

$$T = 100$$

$$Y = C + I + G$$

$$Y = 100 + 0,80(Y - 100) + 150 + 250$$

$$Y = 100 + 0,80Y - 80 + 150 + 250$$

$$Y - 0,80Y = 420$$

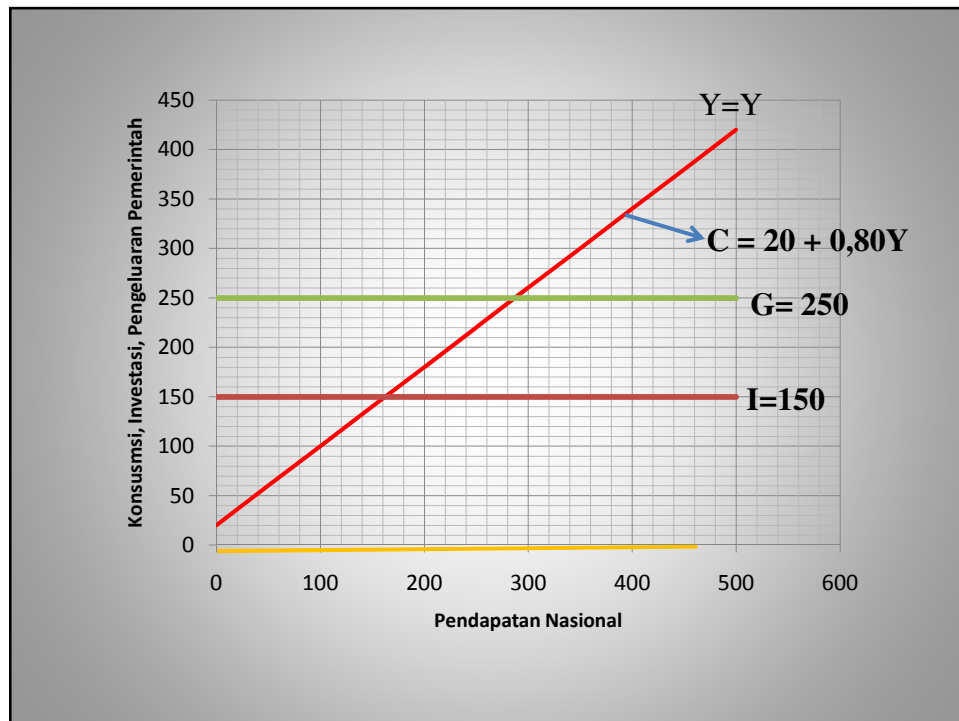
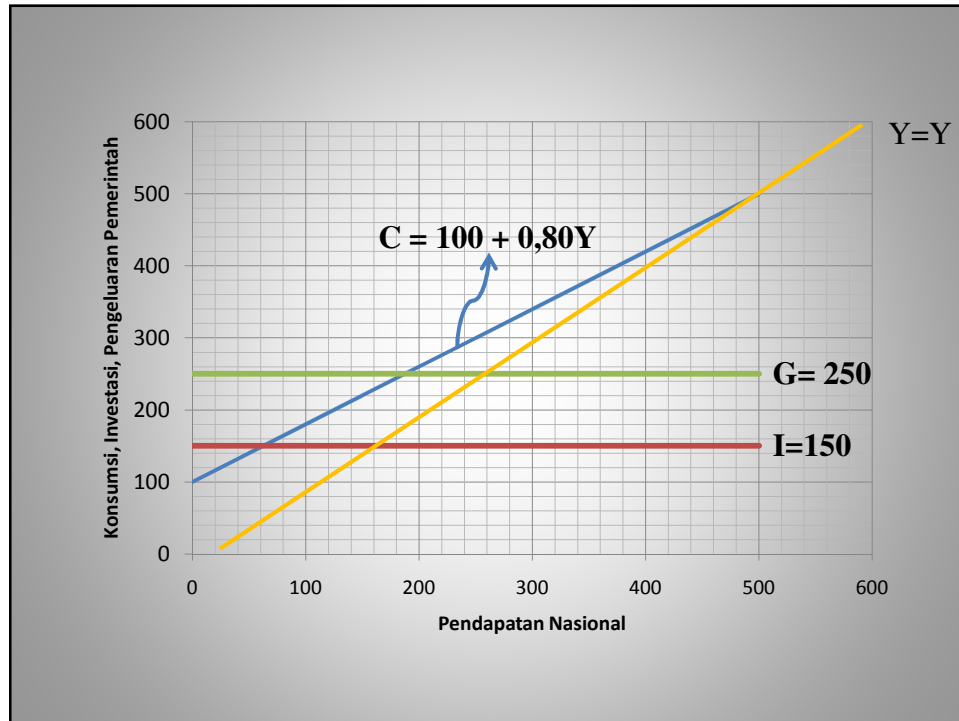
$$Y = 420/0,2 = 2100$$

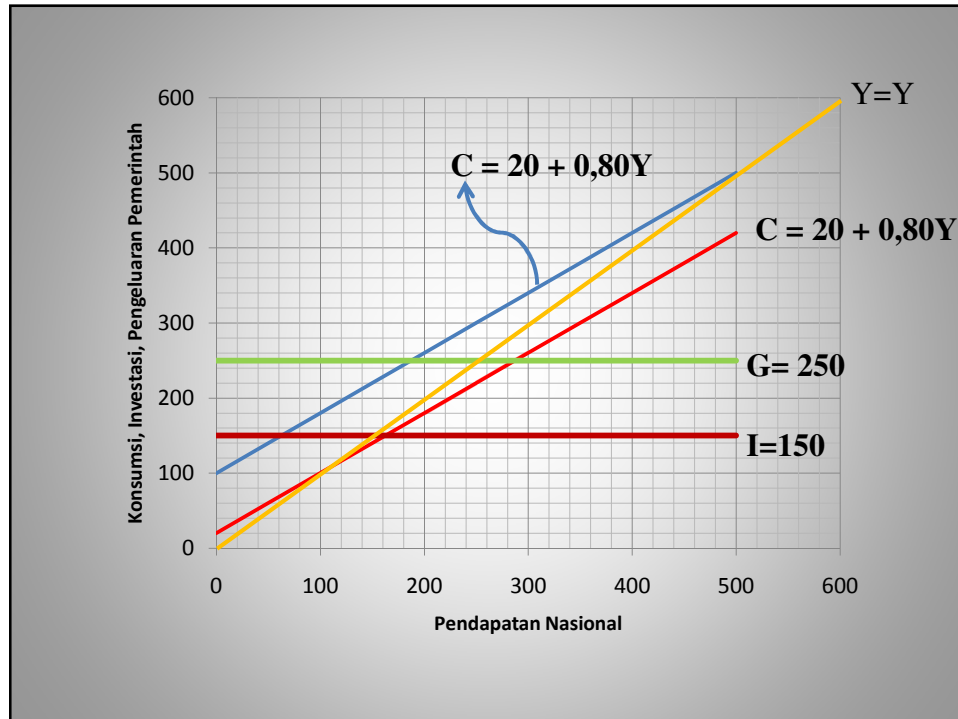
$$Y = C + I + G$$

$$Y = 100 + 0,80Y + 150 + 250$$

$$Y - 0,80Y = 500$$

$$Y = 500/0,2 = 2500$$





## Politik Anggaran

- Anggaran berimbang.
- Anggaran tidak berimbang

$$\Delta Y = \frac{\Delta G}{(1-b)} \Rightarrow \text{Pendapatan Pemerintah}$$

$$\Delta Y = -\frac{b \cdot \Delta T}{(1-b)} \Rightarrow \text{Pajak}$$

### Anggaran Defisit

Pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaan pemerintah digunakan untuk menstimulir pertumbuhan ekonomi, karena perekonomian dalam keadaan resesi.

## Politik Anggaran

$$\Delta Y = \frac{\Delta G}{(1-b)} + \left( -\frac{\Delta T}{(1-b)} \right)$$

$$W = \Delta G - \Delta T$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta G}{(1-b)} + \left( -\frac{b\Delta T}{(1-b)} \right)$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta G - b\Delta T}{(1-b)}$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta G + W - b\Delta T}{(1-b)}$$

$$\Delta Y = \Delta T + \frac{W}{(1-b)}$$

**Kasus :**

$$C = 100 + 0,80Y_d$$

$$I = 150$$

$$G = 250 \rightarrow \Delta G = 250$$

$$T = 150 \rightarrow \Delta T = 150$$

Kondisi keseimbangan awal :

$$Y = C + I + G$$

$$Y = 100 + 0,8(Y - 250) + 150 + 250$$

$$Y = 500 + 0,8Y - 200 = 300 + 0,8Y$$

$$Y = 300 / 0,2 = 1500$$

Anggaran Defisit :

Jika pemerintah menempuh anggaran defisit, ( $\Delta G = 250$  dan  $\Delta T = 150$ ).

$$G_1 = 250 + 250 = 500$$

$$Y_{d1} = Y - 250 - 150 = Y - 400$$

$$C_1 = 100 + 0,8 Y_{d1}$$

$$C_1 = 100 + 0,8 (Y - 400)$$

$$C_1 = 100 + 0,8 Y - 320$$

$$C_1 = -220 + 0,8 Y$$

$$Y = C + I + G$$

$$Y = 220 - 0,8Y + 150 + 500 = 430 + 0,8Y$$

$$Y = 430 / 0,2 = 2150$$

$$\Delta Y = 2150 - 1500 = 650$$

$$\Delta Y = \Delta T + (W/(1 - b)) = 150 + (100/(1-0,8)) = 150 + 500 = 650$$

Anggaran Surplus (Kebijakan fiskal kontraktif):

Penerimaan lebih besar dari pengeluaran, bila  $\Delta C < \Delta T$ , dimana  $\Delta G$  dan  $\Delta T \geq 0$

Kasus :

$$C = 100 + 0,80Y_d$$

$$I = 150$$

$$G = 250 \rightarrow \Delta G = 150$$

$$T = 150 \rightarrow \Delta T = 250$$

Kondisi keseimbangan awal :

$$Y = C + I + G$$

$$Y = 100 + 0,8(Y - 250) + 150 + 250$$

$$Y = 500 + 0,8Y - 200 = 300 + 0,8Y$$

$$Y = 300 / 0,2 = 1500$$



Jika pemerintah menempuh anggaran defisit, ( $\Delta G = 150$  dan  $\Delta T = 250$ ).

$$G_1 = 250 + 150 = 400$$

$$Y_{d1} = Y - 250 - 250 = Y - 500$$

$$C_1 = 100 + 0,8 Y_{d1}$$

$$C_1 = 100 + 0,8 (Y - 500)$$

$$C_1 = 100 + 0,8 Y - 400$$

$$C_1 = -300 + 0,8 Y$$

$$Y = C + I + G$$

$$Y = -300 - 0,8Y + 150 + 400 = 250 + 0,8Y$$

$$Y = 250 / 0,2 = 1250$$

$$\Delta Y = 1250 - 1500 = -250$$

$$\Delta Y = \Delta T + (W/(1 - b)) = 250 - (100/(1-0,8)) = 250 - 500 = -250$$

Anggaran Berimbang :

Pengeluaran = penerimaan ( $G = T$  atau  $\Delta G = \Delta T$ )

$$\Delta Y \text{ karena } \Delta G = \frac{\Delta C}{(1 - b)}$$

$$\Delta Y \text{ karena } \Delta T = - \frac{b \cdot \Delta T}{(1 - b)}$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta C}{(1 - b)} - \frac{b \cdot \Delta T}{(1 - b)}$$

$$\Delta Y = \frac{\Delta T}{(1 - b)} - \frac{b \cdot \Delta T}{(1 - b)}$$

$$\Delta Y = \frac{(1 - b)}{(1 - b)} \cdot \Delta T$$

$$\Delta Y = \Delta T = \Delta G$$

Kasus :

$$C = 100 + 0,80Y_d$$

$$I = 150$$

$$G = 250 \rightarrow \Delta G = 150$$

$$T = 150 \rightarrow \Delta T = 250$$

Bila pemerintah melakukan kebijakan anggaran berimbang  
dimana  $\Delta G = 150$  dan  $\Delta T = 150$ .

$$G_1 = 250 + 150 = 400$$

$$Y_{d1} = Y - 250 - 150 = Y - 400$$

$$C_1 = 100 + 0,8 Y_{d1} = 100 + 0,8 (Y - 400)$$

$$C_1 = 100 + 0,8 Y - 320 = -220 + 0,8 Y$$

$$Y = C + I + G$$

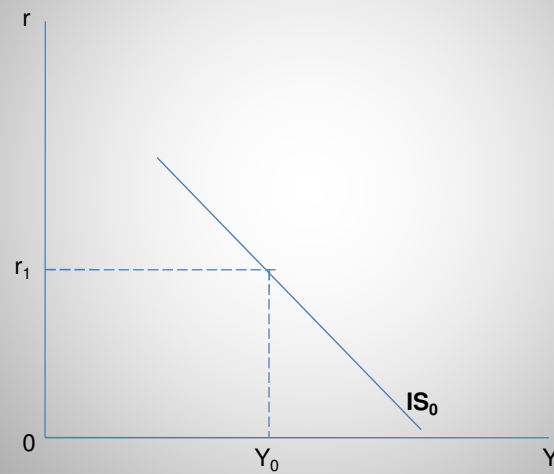
$$Y = -220 - 0,8Y + 150 + 400 = 330 + 0,8Y$$

$$Y = 330 / 0,2 = 1650$$

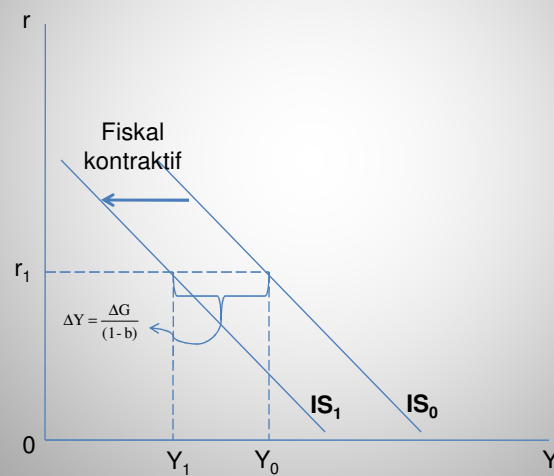
$$\Delta Y = 1650 - 1500 = 150$$

$$\Delta Y = \Delta T + (W/(1 - b)) = 150 - (0/(1-0,8)) = 150 - 0 = 150$$

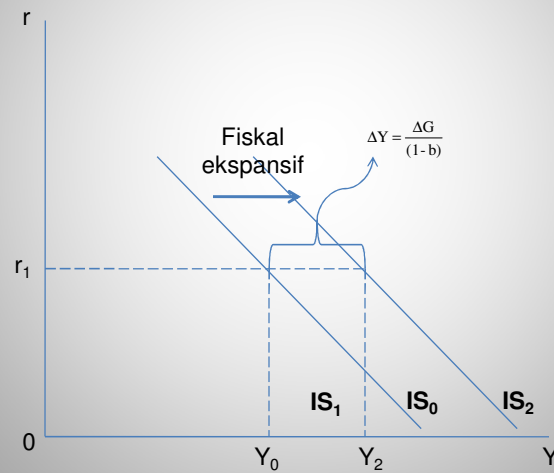
## Efektivitas Kebijakan Fiskal



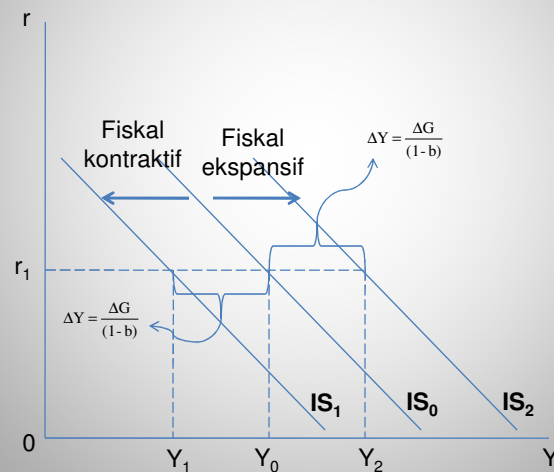
## Efektivitas Kebijakan Fiskal



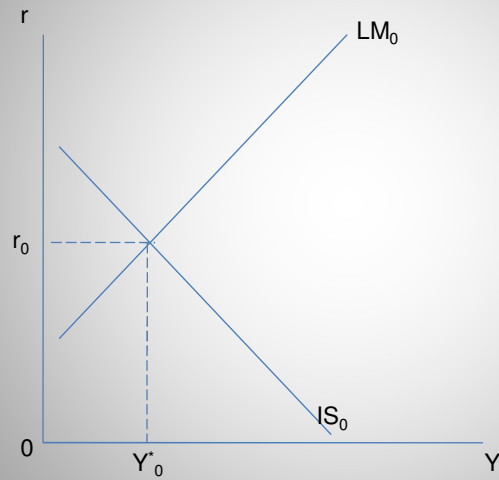
## Efektivitas Kebijakan Fiskal



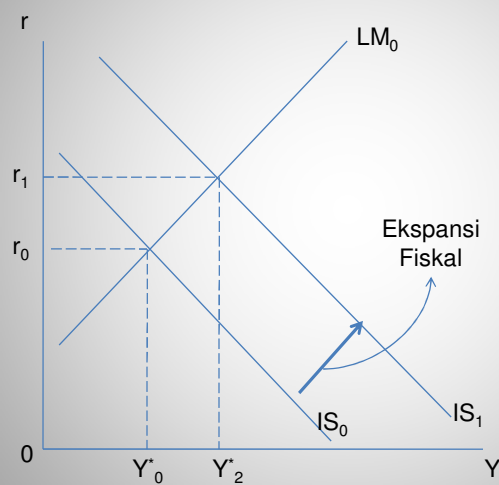
## Efektivitas Kebijakan Fiskal



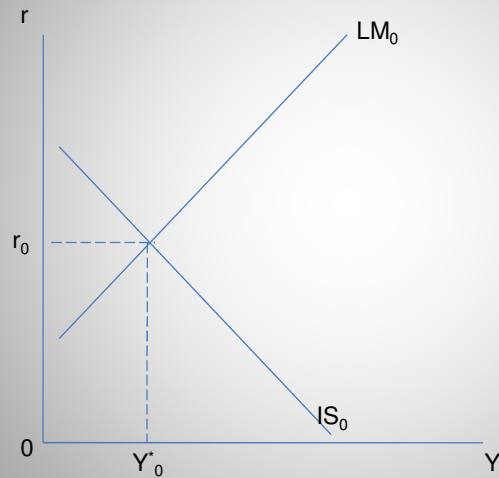
## Kebijakan Fiskal Ekspansif Terhadap Inflasi



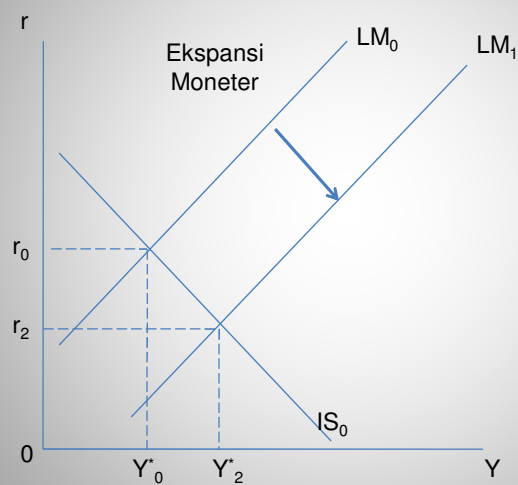
## Kebijakan Fiskal Ekspansif Terhadap Inflasi



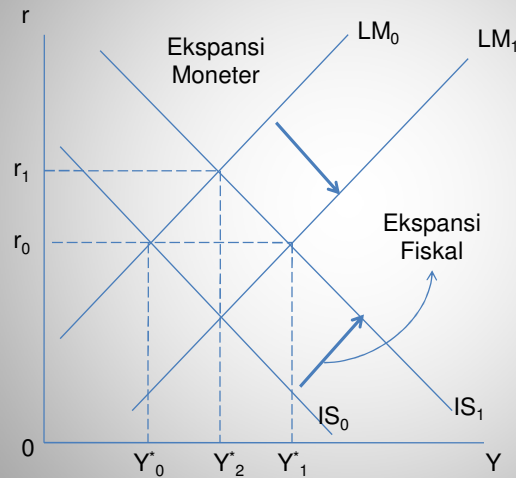
## Kebijakan Fiskal Ekspansif Terhadap Inflasi



## Kebijakan Fiskal Ekspansif Terhadap Inflasi



## Kebijakan Fiskal Ekspansif Terhadap Inflasi



## Efektivitas Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Tingkat harga (bunga)

	Kurva LM Elastis Sempurna (Interval Keynes)	Kurva LM Positif (Interval Antara)	Kurva LM Inelastis Sempurna (Interval Klasik)
<b>Kurva IS Elastis Sempurna</b>	Tidak terdefinisikan	Fiskal Ekspansif: Y naik, r naik. Fiskal Kontraktif: Y turun, r turun.	Kebijakan Fiskal tidak efektif sempurna Fiskal Ekspansif: Y tetap, r naik.
<b>Kurva IS Negatif</b>	Kebijakan Fiskal efektif sempurna Fiskal Ekspansif: Y naik, r tetap. Fiskal Kontraktif: Y turun, r tetap.	Fiskal Ekspansif: Y naik, r naik. Fiskal Kontraktif: Y turun, r turun.	Kebijakan Fiskal tidak efektif sempurna Fiskal Ekspansif: Y tetap, r naik.
<b>Kurva IS Inelastis Sempurna</b>	Kebijakan Fiskal efektif sempurna: Fiskal Ekspansif: Y naik, r tetap. Fiskal Kontraktif: Y turun, r tetap.	Fiskal Ekspansif: Y naik, r naik. Fiskal Kontraktif: Y turun, r turun.	Tidak terdefinisikan

## APBN Indonesia

- APBN sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi → Trilogi Pembangunan (pertumbuhan, pemerataan dan stabilisasi) → Fungsi Fiskal : alokasi barang publik, distribusi pendapatan dan stabilisasi perekonomian.
- Fungsi APBN dilihat dari sisi penerimaan dan pengeluaran (dana mencakup 18 sektor) :
  1. Sarana, prasarana ekonomi : pembangunan jalan raya, pelabuhan, kapasitas listrik, energi dan lain-lain.
  2. Peningkatan sumberdaya manusia : pendidikan, kesehatan dan peranan wanita.
  3. Peningkatan kesejahteraan rakyat ; pembangunan perumahan, pengembangan kehidupan beragama
  4. Peningkatan kapasitas pemerintahan : anggaran pengembangan aparat pemerintahan.

## Struktur Dasar APBN

Penerimaan	Pengeluaran
A. Penerimaan Dalam Negeri: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan Migas</li> <li>2. Penerimaan Pajak</li> <li>3. Penerimaan Bukan Pajak</li> </ol>	C. Pengeluaran Rutin : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja Pegawai</li> <li>2. Belanja Barang</li> <li>3. Subsidi Daerah Otonom</li> <li>4. Bunga dan Cicilan Hutang</li> <li>5. Lain-lain</li> </ol>
B. Penerimaan Pembangunan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan Program</li> <li>2. Bantuan Proyek</li> </ol>	D. Pengeluaran Pembangunan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengeluaran Pembangunan</li> <li>2. Pembiayaan Rupiah</li> </ol>

$$A+B=C+D$$

Tabungan pemerintah = Penerimaan dalam negeri – Pengeluaran rutin



	2008				2009	
	APEN-P	% thd PDB	Perk. Realisasi	% thd PDB	APEN	% thd PDB
<b>A. Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>895,0</b>	<b>20,0</b>	<b>962,5</b>	<b>20,3</b>	<b>982,7</b>	<b>18,5</b>
<b>I. Penerimaan Dalam Negeri</b>	<b>892,0</b>	<b>19,9</b>	<b>959,5</b>	<b>20,3</b>	<b>984,8</b>	<b>18,5</b>
<b>1. Penerimaan Perpajakan</b>	<b>609,2</b>	<b>13,6</b>	<b>633,8</b>	<b>13,4</b>	<b>725,8</b>	<b>13,6</b>
<b>a. Pajak Dalam Negeri</b>	<b>580,2</b>	<b>12,9</b>	<b>599,2</b>	<b>12,7</b>	<b>697,3</b>	<b>13,1</b>
<b>i. Pajak penghasilan</b>	<b>305,0</b>	<b>6,8</b>	<b>318,0</b>	<b>6,7</b>	<b>357,4</b>	<b>6,7</b>
<b>1. PPh Migas</b>	<b>53,6</b>	<b>1,2</b>	<b>62,1</b>	<b>1,3</b>	<b>56,7</b>	<b>1,1</b>
<b>2. PPh Non-Migas</b>	<b>251,4</b>	<b>5,6</b>	<b>255,9</b>	<b>5,4</b>	<b>300,7</b>	<b>5,6</b>
<b>ii. Pajak pertambahan nilai</b>	<b>195,5</b>	<b>4,4</b>	<b>199,8</b>	<b>4,2</b>	<b>249,5</b>	<b>4,7</b>
<b>iii. Pajak bumi dan bangunan</b>	<b>25,3</b>	<b>0,6</b>	<b>25,5</b>	<b>0,5</b>	<b>29,9</b>	<b>0,5</b>
<b>iv. BPHTB</b>	<b>5,4</b>	<b>0,1</b>	<b>5,5</b>	<b>0,1</b>	<b>7,8</b>	<b>0,1</b>
<b>v. Cukai</b>	<b>45,7</b>	<b>1,0</b>	<b>47,0</b>	<b>1,0</b>	<b>49,5</b>	<b>0,9</b>
<b>vi. Pajak lainnya</b>	<b>3,4</b>	<b>0,1</b>	<b>3,3</b>	<b>0,1</b>	<b>4,3</b>	<b>0,1</b>
<b>b. Pajak Perdagangan Internasional</b>	<b>29,0</b>	<b>0,6</b>	<b>34,7</b>	<b>0,7</b>	<b>28,5</b>	<b>0,5</b>
<b>i. Bea masuk</b>	<b>17,8</b>	<b>0,4</b>	<b>19,8</b>	<b>0,4</b>	<b>19,2</b>	<b>0,4</b>
<b>ii. Bea Keluar</b>	<b>11,2</b>	<b>0,2</b>	<b>14,9</b>	<b>0,3</b>	<b>9,3</b>	<b>0,2</b>
<b>2. Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>282,8</b>	<b>6,3</b>	<b>325,7</b>	<b>6,9</b>	<b>288,9</b>	<b>4,9</b>
<b>a. Penerimaan SDA</b>	<b>192,8</b>	<b>4,3</b>	<b>229,0</b>	<b>4,8</b>	<b>173,5</b>	<b>3,3</b>
<b>i. Migas</b>	<b>182,0</b>	<b>4,1</b>	<b>219,1</b>	<b>4,6</b>	<b>162,1</b>	<b>3,0</b>
<b>ii. Non Migas</b>	<b>9,8</b>	<b>0,2</b>	<b>9,9</b>	<b>0,2</b>	<b>11,4</b>	<b>0,2</b>
<b>b. Bagian Laba BUMN</b>	<b>31,2</b>	<b>0,7</b>	<b>35,0</b>	<b>0,7</b>	<b>30,8</b>	<b>0,6</b>
<b>c. PNPB Lainnya</b>	<b>53,7</b>	<b>1,2</b>	<b>56,6</b>	<b>1,2</b>	<b>49,2</b>	<b>0,9</b>
<b>d. Pendapatan BLU</b>	<b>5,1</b>	<b>0,1</b>	<b>5,1</b>	<b>0,1</b>	<b>5,4</b>	<b>0,1</b>
<b>II. Hibah</b>	<b>2,9</b>	<b>0,1</b>	<b>3,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>989,5</b>	<b>22,1</b>	<b>1.022,6</b>	<b>21,6</b>	<b>1.037,1</b>	<b>19,5</b>
<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>697,1</b>	<b>15,5</b>	<b>729,1</b>	<b>15,4</b>	<b>716,4</b>	<b>13,4</b>
<b>A. Belanja K/L</b>	<b>209,0</b>	<b>6,5</b>	<b>266,4</b>	<b>5,6</b>	<b>322,2</b>	<b>6,1</b>
<b>B. Belanja Non K/L</b>	<b>407,0</b>	<b>9,1</b>	<b>462,7</b>	<b>9,8</b>	<b>394,1</b>	<b>7,4</b>
<b>a.1. - Pembayaran Bunga Utang</b>	<b>94,8</b>	<b>2,1</b>	<b>95,5</b>	<b>2,0</b>	<b>101,7</b>	<b>1,9</b>
<b>Subsidi</b>	<b>234,4</b>	<b>5,2</b>	<b>281,7</b>	<b>6,0</b>	<b>266,7</b>	<b>5,1</b>
<b>II. Transfer Ke Daerah</b>	<b>279,4</b>	<b>6,2</b>	<b>279,6</b>	<b>5,9</b>	<b>297,0</b>	<b>5,6</b>
<b>1. Dana Perimbangan</b>	<b>77,7</b>	<b>1,7</b>	<b>78,9</b>	<b>1,7</b>	<b>85,7</b>	<b>1,6</b>
<b>a. Dana Bagi Hasil</b>	<b>179,5</b>	<b>4,0</b>	<b>179,5</b>	<b>3,8</b>	<b>186,4</b>	<b>3,5</b>
<b>b. Dana Alokasi Umum</b>	<b>21,8</b>	<b>0,5</b>	<b>21,2</b>	<b>0,4</b>	<b>24,8</b>	<b>0,5</b>
<b>c. Dana Alokasi Khusus</b>	<b>14,0</b>	<b>0,3</b>	<b>14,0</b>	<b>0,3</b>	<b>23,7</b>	<b>0,4</b>
<b>2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian</b>	<b>7,5</b>	<b>0,2</b>	<b>7,5</b>	<b>0,2</b>	<b>8,9</b>	<b>0,2</b>
<b>a. Dana Otonomi Khusus</b>	<b>6,5</b>	<b>0,1</b>	<b>6,5</b>	<b>0,1</b>	<b>14,9</b>	<b>0,3</b>
<b>b. Dana Penyesuaian</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>35,3</b>	<b>0,7</b>	<b>50,3</b>	<b>1,0</b>
<b>C. Keseimbangan Primer</b>	<b>(94,5)</b>	<b>(2,1)</b>	<b>(60,1)</b>	<b>(1,3)</b>	<b>(51,3)</b>	<b>(1,0)</b>
<b>D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)</b>	<b>92,5</b>	<b>2,1</b>	<b>63,1</b>	<b>1,3</b>	<b>51,3</b>	<b>1,0</b>
<b>E. Pembiayaan (I + II)</b>	<b>107,6</b>	<b>2,4</b>	<b>78,2</b>	<b>1,7</b>	<b>60,8</b>	<b>1,1</b>
<b>I. Pembiayaan Dalam Negeri</b>	<b>(11,7)</b>	<b>(0,3)</b>	<b>(11,7)</b>	<b>(0,2)</b>	<b>16,6</b>	<b>0,3</b>
<b>1. Perbankan dalam negeri</b>	<b>119,3</b>	<b>2,7</b>	<b>89,9</b>	<b>1,9</b>	<b>44,2</b>	<b>0,8</b>
<b>a. Privatisasi (neto)</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>b. Perjanjian PT. PPA</b>	<b>3,9</b>	<b>0,1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>
<b>c. Surat Berharga Negara (neto)</b>	<b>112,8</b>	<b>2,6</b>	<b>91,7</b>	<b>1,9</b>	<b>54,7</b>	<b>1,0</b>
<b>d. Dana Investasi Pemerintah dan Rest. BUMN</b>	<b>(2,9)</b>	<b>(0,1)</b>	<b>(2,9)</b>	<b>(0,1)</b>	<b>(10,3)</b>	<b>(0,2)</b>
<b>II. Pembiayaan Luar negeri (neto)</b>	<b>(13,1)</b>	<b>(0,3)</b>	<b>(14,9)</b>	<b>(0,3)</b>	<b>(9,4)</b>	<b>(0,2)</b>
<b>1. Penarikan Pinjaman LN (bruto)</b>	<b>48,1</b>	<b>1,1</b>	<b>47,1</b>	<b>1,0</b>	<b>52,2</b>	<b>1,0</b>
<b>2. Pembyr. Cicilan Pokok Utang LN</b>	<b>(61,3)</b>	<b>(1,4)</b>	<b>(62,0)</b>	<b>(1,3)</b>	<b>(61,6)</b>	<b>(1,2)</b>

\*) Perbedaan satu angka dibelakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan

Sumber: Departemen Keuangan

	2008				2009	
	APEN-P	% thd PDB	Perkiraan Realisasi 2008	% thd PDB	APEN	% thd PDB
<b>Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>282,8</b>	<b>6,3</b>	<b>325,7</b>	<b>6,9</b>	<b>258,9</b>	<b>4,9</b>
<b>a. Penerimaan SDA</b>	<b>192,8</b>	<b>4,3</b>	<b>229,0</b>	<b>4,8</b>	<b>173,5</b>	<b>3,3</b>
<b>i. Migas</b>	<b>182,9</b>	<b>4,1</b>	<b>219,1</b>	<b>4,6</b>	<b>162,1</b>	<b>3,0</b>
<b>Minyak bumi</b>	<b>149,1</b>	<b>3,3</b>	<b>179,5</b>	<b>3,8</b>	<b>123,0</b>	<b>2,3</b>
<b>Gas bumi</b>	<b>33,8</b>	<b>0,8</b>	<b>39,6</b>	<b>0,8</b>	<b>39,1</b>	<b>0,7</b>
<b>ii. Non Migas</b>	<b>9,8</b>	<b>0,2</b>	<b>9,9</b>	<b>0,2</b>	<b>11,4</b>	<b>0,2</b>
<b>Pertambangan umum</b>	<b>6,9</b>	<b>0,2</b>	<b>6,9</b>	<b>0,1</b>	<b>8,7</b>	<b>0,2</b>
<b>Kehutanan</b>	<b>2,8</b>	<b>0,1</b>	<b>2,8</b>	<b>0,1</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Perikanan</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
<b>b. Bagian Laba BUMN</b>	<b>31,2</b>	<b>0,7</b>	<b>35,0</b>	<b>0,7</b>	<b>30,8</b>	<b>0,6</b>
<b>c. PNPB Lainnya</b>	<b>53,7</b>	<b>1,2</b>	<b>56,6</b>	<b>1,2</b>	<b>49,2</b>	<b>0,9</b>
<b>d. Pendapatan BLU</b>	<b>5,1</b>	<b>0,1</b>	<b>5,1</b>	<b>0,1</b>	<b>5,4</b>	<b>0,1</b>

Sumber: Departemen Keuangan

**Tabel III.23**  
**Pendapatan Negara dan Hibah, 2008—2009**  
 (miliar rupiah)

Uraian	2008				2009	
	APBN-P	% thd PDE	Perk. Real	% thd PDE	APBN	% thd PDE
Pendapatan Negara dan Hibah	895,0	20,0	962,5	20,3	985,7	18,5
I. Penerimaan Dalam Negeri	892,0	19,9	959,5	20,3	984,8	18,5
1. Penerimaan Perpajakan	609,2	13,6	633,8	13,4	725,8	13,6
a. Pajak Dalam Negeri	580,2	12,9	599,2	12,7	697,3	13,1
i. Pajak penghasilan	305,0	6,8	318,0	6,7	357,4	6,7
1. Migas	53,6	1,2	62,1	1,3	56,7	1,1
2. Nonmigas	251,4	5,6	255,9	5,4	300,7	5,6
ii. Pajak pertambahan nilai	195,5	4,4	199,8	4,2	249,5	4,7
iii. Pajak bumi dan bangunan	25,3	0,6	25,5	0,5	28,9	0,5
iv. BPHTB	5,4	0,1	5,5	0,1	7,8	0,1
v. Cukai	45,7	1,0	47,0	1,0	49,5	0,9
vi. Pajak lainnya	3,4	0,1	3,3	0,1	4,3	0,1
b. Pajak Perdagangan Internasional	29,0	0,6	34,7	0,7	28,5	0,5
i. Bea masuk	17,8	0,4	19,8	0,4	19,2	0,4
ii. Bea keluar	11,2	0,2	14,9	0,3	9,3	0,2
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	282,8	6,3	325,7	6,9	258,9	4,9
a. Penerimaan SDA	192,8	4,3	229,0	4,8	173,5	3,3
i. Migas	182,9	4,1	219,1	4,6	162,1	3,0
ii. Nonmigas	9,9	0,2	9,9	0,2	11,4	0,2
b. Bagian Laba BUMN	31,2	0,7	35,0	0,7	30,8	0,6
c. PNEP Lainnya	53,7	1,2	56,6	1,2	49,2	0,9
d. Pendapatan BLU	5,1	0,1	5,1	0,1	5,4	0,1
II. Hibah	2,9	0,1	3,0	0,1	0,9	0,0

Sumber : Departemen Keuangan